

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN PARIWISATA
GUNA MENDUKUNG *GREEN ECONOMY***

Oleh:

SUSWANTO, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 71040404

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN PARIWISATA GUNA Mendukung GREEN ECONOMY”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024 mengenai Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap Mayjen TNI (Purn) M. Nasir Madjid, S.E. dan Tim Penguji Taskap kami, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI dan segenap unsur

Pemerintah, termasuk bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pariwisata khususnya desa wisata, guna mendukung *green economy*.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suswanto, S.I.K., M.Si
Pangkat/NIP : Kombes Pol NRP. 71040404
Jabatan : Anjak Madya Bidang Ekonomi Baintelkam
Instansi : Polri
Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2024

Penulis,



Suswanto, S.I.K., M.Si
Kombes Pol NRP. 71040404

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	8
6. Pengertian	9
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	11
8. Peraturan Perundang-undangan.....	12
9. Data dan Fakta	15
10. Kerangka Teoretis.....	18
11. Lingkungan Strategis.....	22
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	30
13. Kondisi Pengelolaan Pariwisata di Indonesia Saat Ini Dalam Mendukung <i>Green Economy</i>	31
14. Faktor Penyebab Masalah Dalam Pengelolaan Pariwisata dan Dampaknya terhadap <i>Green Economy</i>	41
15. Strategi Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Guna Mendukung <i>Green Economy</i>	51
BAB IV PENUTUP	
16. Simpulan	66

17. Rekomendasi..... 67

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Green economy atau ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2045. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mewujudkan visi masa depan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Potensi pertumbuhan ekonomi hijau dan dekarbonisasi mencapai hampir 400 miliar dollar AS, terbagi dalam tiga bidang utama¹. Optimalisasi intensitas gas rumah kaca (GRK) memiliki potensi pasar 350 miliar dollar AS, sementara strategi dan layanan profesional serta kompensasi emisi masing-masing memiliki potensi pasar 46 miliar dollar AS dan 3,5 miliar dollar AS. Sebagai ilustrasi, sekitar 30 persen dari cadangan karbon dunia berada di lahan gambut Indonesia, menunjukkan potensi besar dalam perdagangan yang mengutamakan pelestarian lahan gambut. Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan menjadi pelaku utama di pasar hijau yang berkembang pesat ini.

Secara konsepsi, *green economy* merupakan suatu sistem ekonomi yang mempromosikan keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami dan mengurangi emisi karbon. Dengan kata lain, definisi *green economy* ada pada praktik penggunaan yang rendah karbon, pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan inklusi sosial². *Green economy* juga meliputi kegiatan ekonomi (konsumsi, distribusi, dan produksi) barang serta jasa dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan masyarakat sembari mengedepankan prinsip keberlanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan³.

¹ Danur Lambang Priandi, "Potensi Besar, Indonesia Bisa Raup Pertumbuhan Hijau Hampir 400 Miliar Dollar As," KOMPAS.com, 13 Juli 2023, diakses dari sumber (Online), pada 29 April 2024, pukul 09.55 WIB.

² Melynia Ariningtyas Prabawati, 2022, "Konsep *Green Economy* pada Pola Produksi dan Konsumsi Sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Berkualitas Berbasis Ekologi," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, hlm. 36-42.

³ "Green economy, Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," diakses dari <https://itn.ac.id/opini/15-agustus-23-green-economy-manajemen-pemanfaatan-sumber-daya-alam-sebagai-instrumen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/> pada 15 Februari 2024 pukul 15.00.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan iklim tropis sepanjang tahun yang memiliki banyak potensi di sektor pariwisata. Dalam pengelolaannya, sektor pariwisata tentu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, mulai dari penyerapan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, hingga pemberdayaan UMKM. Oleh karena itulah pengelolaan pariwisata nasional harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan, dengan mengadopsi prinsip *green economy*.

Pelaksanaan *green economy* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: jumlah penduduk, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, struktur industri, urbanisasi, peraturan lingkungan, dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*)⁴. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, *green economy* menjadi relevan karena pariwisata sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *green economy* dalam pengelolaan pariwisata, seperti penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, kita dapat menciptakan destinasi wisata yang lestari dan meminimalkan jejak ekologis negatif.

Dalam konteks ini, korelasi antara *green economy* dan pengelolaan pariwisata terletak pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan alam yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Hal ini diharapkan dapat membentuk siklus positif yang saling mendukung antara kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan pengembangan pariwisata. Selain itu, penerapan *green economy* di sektor pariwisata juga merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional. *Green economy* diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, alih fungsi lahan hutan dan pencemaran air, sambil mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan.

Pengelolaan pariwisata yang mengadopsi perspektif *green economy* sangat penting karena memungkinkan pelestarian alam dan sumber daya

⁴ M. Firmansyah, 2022, "Konsep Turunan *Green economy* dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur," *Ecoplan*, hlm.141-149.

alam yang penting bagi keberlanjutan industri pariwisata itu sendiri. Dengan memperhatikan aspek-aspek seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan lingkungan, pariwisata dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan daya tarik alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, pendekatan *green economy* juga mendorong inklusi sosial dan ekonomi, dengan memberikan peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata yang berfokus pada *green economy* dapat menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, maka secara terminologi, pariwisata merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki korelasi dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme⁵. Menurut UU RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah⁶.” Perlu diketahui bahwa pengelolaan pariwisata di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: kesadaran pengunjung serta masyarakat dalam menjaga lingkungan wisata, aktivitas promosi wisata, sarana dan prasarana, serta dukungan pemerintah⁷.

Namun di sisi lain, Indonesia masih memiliki tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pariwisata secara umum. **Pertama**, dari aspek SDM. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Indonesia memiliki kelemahan dalam tiga area yang berkaitan dengan sumber daya manusia di sektor pariwisata, yakni kemampuan berbahasa asing terutama dalam bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi (TI), dan keterampilan manajerial. Akibatnya, tingkat daya

⁵ “pa.ri.wi.sa.ta,” diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata> pada 15 Februari 2024 pukul 15.10.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁷ Rizal Fatli Maulana, Muhammad Rosul Asmawi, Pri Utami, “Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang,” *Jurnal Kewarganegaraan*, hlm. 6297-6301.

saing SDM di kawasan ASEAN menjadi rendah⁸. **Kedua**, sarana prasarana. Kekurangan ini masih banyak ditemukan di berbagai wilayah wisata di Indonesia, seperti di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, khususnya Desa Madiredo di mana sarana dan prasarana pariwisatanya masuk ke dalam Hierarki IV atau kurang memadai⁹. **Ketiga**, regulasi. Di Indonesia, masih banyak peraturan terkait pariwisata yang tumpang tindih. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat, melalui Balai Konservasi Borobudur, telah menetapkan larangan terhadap berbagai aktivitas di zona satu dan dua kawasan Candi Borobudur. Namun, di zona tersebut, pemerintah daerah justru mengizinkan berbagai kegiatan seperti konser musik dan pertunjukan seni lainnya. Contoh lainnya adalah adanya pembangunan bangunan atau penanaman pohon yang mengganggu integritas visual dari kawasan Candi Borobudur sebagai warisan bersejarah¹⁰.

Dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata Indonesia berbasis *green economy* dapat ditinjau dari keberadaan desa wisata yang akhir-akhir ini mulai marak di berbagai wilayah. Desa pariwisata merujuk pada sebuah masyarakat maupun kelompok yang terdiri dari penduduk dalam area tertentu, dimana mereka berinteraksi secara langsung dan memiliki kesadaran, kepedulian, juga keinginan untuk berkolaborasi sesuai dengan keahlian dan kapasitas individu masing-masing¹¹. Menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah desa pariwisata di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 4.674, menunjukkan peningkatan sebesar 36,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana hanya

⁸ "3 Masalah SDM Pariwisata Indonesia Bersaing di Tingkat Global," diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-3176358/3-masalah-sdm-pariwisata-indonesia-bersaing-di-tingkat-global> pada 15 Februari 2024 pukul 15.30.

⁹ Mohamad Agus Sanjaya, Agus Purnomo, Bayu Kurniawan, "Evaluasi Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, hlm. 63-72.

¹⁰ Nugroho SBM, 2020, "BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA," *Pariwisata*, hlm. 124-131.

¹¹ "Apa itu Desa Wisata dan Bagaimana Konsep Pengembangannya?," diakses dari <https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZHJxaHA5MkxNUWhxRjNDY2krcDZXQT09/apa-itu-desa-wisata-dan-bagaimana-konsep-pengembangannya-.html> pada 15 Februari 2024 pukul 15.45.

terdapat 3.419 desa pariwisata¹². Perkembangan desa wisata ini diharapkan dapat mendorong terciptanya 4,4 juta lapangan kerja pada tahun 2024¹³.

Prinsip ekonomi hijau dan desa wisata dapat saling mendukung dalam menciptakan model pembangunan berkelanjutan. Desa wisata memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk pariwisata, sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang menekankan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan transportasi hijau, menjadi prioritas dalam keduanya. Selain itu, desa wisata memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam industri pariwisata, sejalan dengan prinsip inklusivitas ekonomi hijau. Dengan menjadi pusat edukasi lingkungan, desa wisata juga mempromosikan kesadaran akan keberlanjutan, mendukung tujuan ekonomi hijau. Pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan di desa wisata mengedukasi dan mendorong konsumsi bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, bisnis, dan organisasi non-pemerintah memperkuat hubungan antara kedua konsep ini, memungkinkan pembangunan yang holistik untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di daerah tersebut.

Meskipun di satu sisi Indonesia masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pariwisata, seperti yang terungkap dalam analisis tentang kelemahan SDM, kurangnya sarana prasarana, dan tumpang tindihnya regulasi, pada praktiknya, masalah-masalah yang spesifik dalam pengelolaan destinasi pariwisata tertentu juga menjadi perhatian serius. Ketiga hambatan yang masih menjadi kendala akan berimplikasi pada lahirnya masalah lain yang lebih spesifik.

Sebagai contoh, di Desa Wisata Bayung, Bali, terdapat sejumlah problematika yang lebih spesifik, termasuk masalah sampah, keberlanjutan perawatan infrastruktur, dan kurangnya keseragaman visi serta misi dalam pengelolaan desa wisata¹⁴. Hal serupa juga dapat ditemukan di Desa Wisata

¹² "Ayo Jelajahi Desa Wisata Peraih Rekor MURI," diakses dari [https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayojelajahi-desawisata-peraih-rekor-muri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,4%2C674%20d%20esa%20wisata%20di%20Indonesia](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayojelajahi-desawisata-peraih-rekor-muri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,4%2C674%20d%20esa%20wisata%20di%20Indonesia.). Pada 15 Februari 2024 pukul 15.48.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ I Made Pujiwiyanawa & I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2018, "Problematika Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli," *Jurnal Destinasi Pariwisata*, hlm. 368-370.

Wonosoco, Kabupaten Kudus. Bahkan, desa wisata ini tengah berada dalam kondisi *cash cow*, di mana pertumbuhan produk di desa ini relatif rendah walaupun pertumbuhan pasarnya tinggi. Lebih lanjut, desa ini juga menghadapi problematika belum terbangunnya sarana penting, rendahnya aksesibilitas, serta kurangnya unsur kelembagaan yang secara khusus mengelola desa ini¹⁵. Permasalahan sampah, kurangnya keseragaman visi, hingga kurangnya unsur kelembagaan adalah contoh dari masalah SDM yang belum terselesaikan.

Jika pengelolaan pariwisata nasional masih belum optimal, dampaknya akan sangat merugikan bagi perwujudan *green economy*. Apalagi keberadaan desa-desa wisata ini sejatinya dapat menjadi percontohan bagi pengelolaan pariwisata yang berbasis ekonomi hijau. Dampak negatif *pertama*, akan terjadi kerusakan lingkungan secara masif karena kurangnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan polusi di daerah-daerah wisata. Hal ini akan mengancam keberlanjutan ekosistem yang menjadi daya tarik wisata. *Kedua*, kesempatan untuk mengembangkan energi baru terbarukan dan teknologi hijau dalam sektor pariwisata akan terlewatkan, sehingga menghambat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. *Ketiga*, masyarakat lokal juga akan menderita akibat kurangnya manfaat ekonomi dari pariwisata yang berkelanjutan (karena ada polusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan), sehingga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itulah pembahasan mengenai pengelolaan pariwisata dengan perspektif keberlanjutan ini memiliki urgensi untuk dikaji lebih lanjut sehingga dapat mendukung penerapan *green economy*.

2. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan luas dalam mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu inovasi yang telah dijalankan adalah melalui keberadaan Desa Wisata. Dampak positifnya langsung dirasakan oleh masyarakat, namun masih ada sejumlah permasalahan yang terkait dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan pengembangan pariwisata

¹⁵ Tunjung Wulan dan Parfi Khadiyanto, "Identifikasi Potensi dan Masalah Desa Wonosoco dalam Upaya Pengembangan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kudus," *Jurnal Ruang*, hlm. 81-90.

secara berkeadilan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan adalah:
Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan pariwisata guna mendukung *green economy*?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan kajiannya adalah:

- a. Bagaimana kondisi pengelolaan pariwisata di Indonesia saat ini dalam mendukung *green economy*?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab akar masalah dalam pengelolaan pariwisata dan dampaknya terhadap *green economy*?
- c. Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata guna mendukung *green economy*?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya optimalisasi pengelolaan pariwisata guna mendukung *green economy*.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada stakeholder terkait dalam rangka pemecahan masalah pengelolaan pariwisata guna mendukung *green economy*.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan Taskap ini meliputi pada aspek peningkatan pengelolaan pariwisata di Indonesia, khususnya keberadaan desa wisata dengan mengadopsi perspektif *green economy*.
- b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut.

1) **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku, disajikan pula data dan fakta terkait, serta kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada lingkup global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya optimalisasi pengelolaan pariwisata guna mendukung *green economy*. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan landasan pemikiran sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, konkret dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan yang merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian serta beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan.**

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini antara lain menggunakan metode deskriptif analitis dan PESTEL (*Political, Economy, Social, Technology, Environment and Legal*). Metode ini berfokus pada analisis risiko berdasarkan aspek-aspek utama sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat dihasilkan kebijakan terbaik.

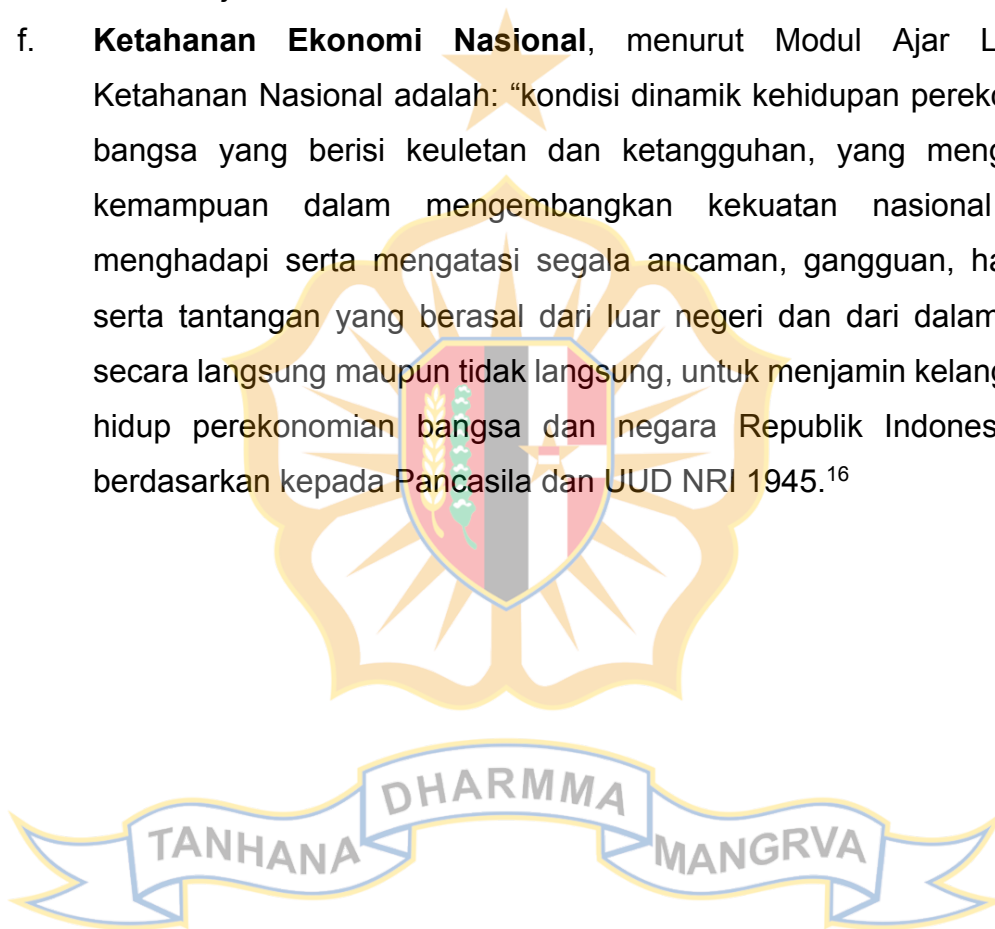
b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan asas kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Optimalisasi**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi merupakan suatu proses, metode, dan tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan suatu hal, yaitu membuatnya menjadi yang terbaik, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dan memperoleh hasil yang optimal. Dalam konteks ini, optimalisasi merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau kinerja suatu hal sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- b. **Pengelolaan**, menurut KBBI, pengelolaan adalah serangkaian proses, cara, atau tindakan yang meliputi pelaksanaan dan pengaturan aktivitas tertentu. Ini juga mencakup penyelenggaraan kegiatan dengan melibatkan partisipasi tenaga kerja lain serta pembentukan kebijakan dan tujuan organisasi.
- c. **Pariwisata**, menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan.
- d. **Desa Wisata**, adalah sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa wisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- e. **Green Economy**, menurut UNEP, atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, merumuskan konsep *green economy* sebagai sebuah model ekonomi yang mengutamakan pengurangan emisi karbon, penggunaan sumber daya yang efisien, serta memperhatikan aspek inklusi sosial. Model ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
- f. **Ketahanan Ekonomi Nasional**, menurut Modul Ajar Lembaga Ketahanan Nasional adalah: “kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁶



¹⁶ Modul Ajar Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional.

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Optimalisasi pengelolaan pariwisata merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari industri pariwisata, sambil meminimalkan dampak negatifnya. Dalam konteks *green economy*, optimalisasi pengelolaan pariwisata menjadi semakin penting karena pergeseran global menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, upaya optimalisasi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mendorong konservasi alam dan pelestarian budaya.

Bab ini akan mengelaborasi aspek-aspek seperti peraturan perundang-undangan, himpunan data-fakta terkait judul, kerangka teoritis, dan lingkungan strategis memiliki signifikansi yang penting. Peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang mengatur praktik-praktik dalam pengelolaan pariwisata menuju *green economy*. Kerangka teoritis untuk mendukung optimalisasi desa wisata berbasis ekonomi hijau juga dipaparkan. Sementara itu, himpunan data-fakta membantu dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang perlu diatasi, sedangkan kerangka teoritis memberikan landasan konseptual untuk merancang strategi optimalisasi.

Di sisi lain, lingkungan strategis mempengaruhi implementasi strategi dengan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis ini mencakup aspek global, regional dan juga nasional, yang merujuk pada pendekatan Astagatra. Memadukan pemahaman atas semua aspek ini akan memungkinkan pengembangan strategi optimalisasi yang terarah dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung *green economy*.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

1) **Pasal 2:** Pasal ini memiliki relevansi yang sangat besar terhadap optimalisasi pengelolaan pariwisata untuk mendukung *green economy*. Pertama-tama, asas-asas yang tercantum seperti manfaat, keadilan, kelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan secara langsung mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang merupakan inti dari konsep *green economy*. Pengelolaan pariwisata yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat setempat, memperhatikan keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan akan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

2) **Pasal 6:** Pembangunan kepariwisataan yang berdasarkan pada asas keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam mencerminkan pendekatan berkelanjutan yang mementingkan pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, optimalisasi pengelolaan pariwisata dapat difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan menghargai keberagaman lokal. Selain itu, mencantumkan kebutuhan manusia untuk berwisata juga menunjukkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) **Pasal 3:** Pasal tersebut sangat relevan dengan konsep optimalisasi pengelolaan pariwisata untuk mendukung *green economy*. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan dalam pasal tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang juga menjadi fokus dalam *green economy*. Melalui aspek-aspek seperti melindungi wilayah

negara dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan manusia, menjaga kelestarian ekosistem, dan mencapai keseimbangan lingkungan hidup, upaya optimalisasi pengelolaan pariwisata dapat menjadi sarana untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

- 2) **Pasal 4:** Pasal tersebut memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks optimalisasi pengelolaan pariwisata untuk mendukung *green economy*. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi landasan penting bagi upaya mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam strategi pengelolaan pariwisata, dapat diupayakan agar pembangunan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

c. **Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025**

- 1) **Pasal 55:** Dengan menekankan pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia, dan ekonomi hijau, arah kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap aspek pengembangan pariwisata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelolaan pariwisata dapat diarahkan untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- 2) **Pasal 56:** Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di sepanjang rantai nilai pariwisata, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan praktik bisnis yang ramah lingkungan, dapat ditingkatkan kontribusi pariwisata terhadap

pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, dengan mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya, dapat diupayakan agar aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian warisan budaya.

d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

- 1) **Pasal 2:** Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang mencakup pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan, menegaskan pentingnya memperhatikan berbagai aspek keberlanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam strategi pengelolaan pariwisata, dapat diupayakan agar destinasi pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.
- 2) **Pasal 3:** Pasal ini menyoroti pentingnya menerapkan kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tidak hanya pada skala besar seperti taman nasional atau desa wisata, tetapi juga pada skala kecil seperti kelompok, komunitas lokal, museum, festival, bangunan umum, dan monumen. Ini menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan dapat diterapkan secara luas dalam berbagai konteks pariwisata, tidak terbatas pada bisnis komersial seperti hotel atau atraksi yang berbayar. Dengan menerapkan kriteria berkelanjutan pada destinasi pariwisata di semua tingkatan, dapat diupayakan agar setiap elemen pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

9. Data dan Fakta

a. Daya Saing Pariwisata Indonesia

Menurut laporan terbaru dari *World Economic Forum* pada tahun 2022, indeks pariwisata Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan melonjak 12 peringkat dari peringkat sebelumnya yang berada di posisi 44, kini mencapai peringkat 32 dunia, meskipun tengah diwarnai oleh pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memiliki ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri pariwisata global. Dengan target yang dicanangkan, yakni masuk ke dalam 30 besar dunia pada Indeks Daya Saing Pariwisata dan Perjalanan (*Travel and Tourism Competitiveness Index/TTCI*) pada tahun 2025, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata, menggambarkan upaya keras pemerintah untuk memajukan industri ini di tengah tantangan global yang tidak mudah¹⁷.

Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) mengadopsi 14 pilar yang diukur dengan standar seragam. Di antara pilar-pilar tersebut termasuk lingkungan bisnis, keamanan, kesehatan, sumber daya manusia, kesiapan teknologi informasi, prioritas perjalanan dan pariwisata, keterbukaan internasional, daya saing harga, keberlanjutan lingkungan, infrastruktur transportasi udara, infrastruktur darat dan pelabuhan, infrastruktur layanan pariwisata, sumber daya alam, serta sumber daya budaya dan perjalanan bisnis.¹⁸ Indikator-indikator ini telah lama menjadi bagian dari laporan TTCI untuk membantu negara-negara mengevaluasi tingkat daya saing pariwisata mereka, sambil mengidentifikasi kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

b. Tren Desa Wisata di Indonesia

¹⁷ Kiki Oktaliani, "Indeks Daya Saing Naik 12 Peringkat, Sandiaga Uno Targetkan Pariwisata Indonesia Masuk 30 Besar Dunia Di 2025," SINDOnews Lifestyle, 24 Oktober 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2024, pukul 19.16 WIB.

¹⁸ Yuviani Kusumawardhani, "Kajian 14 Pillar Pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Sebagai Indikator Daya Saing Pariwisata Suatu Negara," *Tourism Scientific Journal* 6, no. 1 (23 Desember 2020): 79–95, URL.

Pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah desa wisata di Indonesia, mencapai 4.674 desa. Angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 36,7% dari tahun sebelumnya yang mencatat 3.419 desa wisata.¹⁹ Pertumbuhan ini mencerminkan dorongan besar dalam pengembangan pariwisata lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memimpin dengan jumlah desa wisata terbanyak, mencapai 480, sedangkan Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan 453 desa wisata. Ini menandai kontribusi yang signifikan dari daerah-daerah tersebut dalam memajukan pariwisata lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.²⁰ Meskipun masa pandemi COVID-19 yang menantang, terjadi peningkatan kunjungan ke desa wisata sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan semakin mengarah ke destinasi-destnasi yang lebih terpencil dan berkelanjutan. Kemenparekraf menetapkan target ambisius yaitu mencapai 6.000 desa wisata terdaftar pada tahun 2024, menunjukkan komitmen dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dan keinginan untuk memperluas manfaat pariwisata ke lebih banyak komunitas lokal.

c. Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada triwulan I tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara kumulatif mencapai 2,5 juta, menandai lonjakan sebesar 508,87% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengeluarkan prediksi bahwa jumlah kunjungan wisman hingga akhir tahun ini kemungkinan akan mencapai sekitar 9 juta kunjungan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dan merupakan penyumbang utama devisa.

¹⁹ Febriana Sulistya Pratiwi and Dimas Bayu, "Sebaran Desa Wisata Indonesia Pada 2023, Terbanyak Di Sulsel," *DataIndonesia.id*, 27 April 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2024, pukul 19.24 WIB

²⁰ *Ibid.*

Dalam laporan *Tourism Trends and Policies 2022* dari *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, disebutkan bahwa pada tahun 2019, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 5,0% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan drastis kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, turun sebesar 56% menjadi hanya 2,2% dari total ekonomi.²¹

Kebijakan pembatasan yang diberlakukan di berbagai negara untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah kunjungan wisman, dari 16,1 juta pada tahun 2019 menjadi hanya 4,0 juta pada tahun 2020. Bahkan, pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisman kembali turun drastis, hanya mencapai 1,5 juta kunjungan, mengalami penurunan sebesar 61,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, sektor pariwisata diharapkan dapat mencapai prestasi yang mengesankan pada tahun 2024. Diperkirakan bahwa jumlah kunjungan wisman akan berkisar antara 9,5 hingga 14,3 juta, sementara jumlah perjalanan wisnus diperkirakan mencapai 1,250 hingga 1,5 miliar. Target kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 diestimasi akan menghasilkan devisa sebesar US\$7,38 hingga US\$13,08 miliar, serta memberikan kontribusi sebesar 4,5% terhadap PDB dan menciptakan 22,8 juta lapangan kerja. Hal ini menunjukkan harapan besar akan peran penting sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia.

d. Desa Wisata Percontohan di Indonesia

²¹ C S Purwowidhu, "Kian Melesat Di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi," *Media Keuangan*, 16 Mei 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2024, pukul 19.38 WIB

Pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengumumkan pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), sebuah penghargaan yang memilih desa wisata terbaik dan paling favorit. Sejumlah desa wisata berhasil meraih penghargaan dalam berbagai kategori pada acara ADWI 2023. Desa Wisata Lawang di Sumatra Barat dinobatkan sebagai pemenang kategori "Homestay dan Toilet", sementara Desa Wisata Taraju di Jawa Barat meraih kategori "Digital dan Kreatif".²²

Di Kepulauan Bangka Belitung, Desa Wisata Tari Rebu keluar sebagai pemenang kategori "Suvenir", dan Desa Wisata Iboih di Aceh memenangkan kategori "Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE". Selain itu, beberapa desa wisata yang berpartisipasi dalam ADWI 2023 juga meraih rekor MURI, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat, Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, Desa Wisata Botubarani, Desa Wisata Muntei, Desa Wisata Tari Rebo, dan Desa Wisata Kwau. Ini menandai pengakuan atas dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan oleh berbagai desa wisata dalam upaya mempromosikan potensi pariwisata lokal di Indonesia.

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Manajemen

Menurut Weber (2022), terdapat pembagian tugas dan spesialisasi yang mengatur setiap individu dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan ketetapan hukum yang berlaku. Hubungan antarindividu dalam organisasi cenderung bersifat impersonal. Hierarki wewenang juga hadir di dalam organisasi, di mana aturan yang mengatur bahwa yang berada di tingkat yang lebih rendah harus patuh terhadap perintah dari tingkat di atasnya. Orientasi pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pertumbuhan karier, di mana keahlian menjadi kriteria utama dalam penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota organisasi serta dalam proses

²² Anggara Wikan Prasetya, "Daftar Pemenang ADWI 2023, Ada 75 Desa Di Seluruh Indonesia," KOMPAS.com, 28 Agustus 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2023, pukul 19.46 WIB

promosinya. Untuk mencapai hasil yang optimal, semua keputusan yang dijalankan harus senantiasa selaras dengan seberapa besar keuntungan yang dapat diberikan terhadap ketercapaian cita-cita organisasi²³.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, terutama di desa wisata, penting untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep utama dari teori manajemen. Perencanaan yang matang diperlukan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa wisata, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pembentukan struktur organisasi yang efisien dan efektif juga diperlukan untuk mengelola aktivitas pariwisata dengan baik. Hal ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta²⁴.

Pengarahannya sumber daya manusia dan materi juga menjadi kunci, melalui pelatihan karyawan, promosi destinasi, dan pembangunan infrastruktur pariwisata yang sesuai. Koordinasi yang baik antara stakeholder adalah esensial, untuk memastikan sinkronisasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, sambil menghindari konflik kepentingan. Terakhir, kontrol yang efektif dalam memantau kinerja dan hasil dari kegiatan pengelolaan pariwisata sangatlah penting, untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara holistik, pengelolaan pariwisata di desa wisata dapat dijalankan secara efisien dan efektif, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

b. Teori *Green Economy*

Dalam tulisan Anwar (2022), ekonomi hijau menawarkan solusi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan rendah

²³ Yusri A. Boko, 2022, "Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah dan Teori Organisasi Klasik)," *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)* hlm. 49-61.

²⁴ Ratna Diyah Palupi dan Ira Risfandi, "Strategi Pengembangan Wisata Bahari Desa Namu Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Sadar Wisata," *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 14, no. 1 (9 September 2019): 8–14, DOI.

karbon, hemat sumber daya, dan inklusivitas sosial. Investasi publik dan swasta diarahkan pada kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset ramah lingkungan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Ekonomi hijau berfokus pada pengurangan emisi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Konsep ini mengantarkan kita pada sinergi antara ekonomi dan lingkungan, bukan lagi perdebatan tentang rekonsiliasi. Tantangan utama ekonomi hijau adalah mencapai skala ekonomi optimal, yang membutuhkan efisiensi material dan energi yang lebih tinggi²⁵.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata, konsep *Green Economy* menawarkan kerangka kerja yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu unsur utama dari teori *Green Economy* adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.²⁶ Dalam konteks desa wisata, hal ini mencakup perlindungan ekosistem alami, pengelolaan limbah, dan pelestarian alam yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan juga menjadi fokus utama, seperti penggunaan energi terbarukan dan transportasi yang efisien, untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak merusak lingkungan.

Aspek sosial juga tidak boleh diabaikan, dengan adanya penekanan pada pengarusutamaan kesejahteraan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata. Ini mencakup distribusi pendapatan yang adil, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, serta pelestarian budaya dan warisan lokal. Edukasi dan kesadaran lingkungan juga menjadi penting, baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, untuk memastikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas pariwisata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Green Economy* secara holistik, diharapkan

²⁵ Muhkamat Anwar, 2022, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral," *PKN*, hlm. 343-356.

²⁶ Agung Yoga Asmoro, "Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Terhadap Metode, Topik, Dan Aplikasinya," *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 8 Januari 2023, URL.

pengelolaan pariwisata di desa wisata dapat menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian budaya lokal.

c. Konsep Pemberdayaan

Dalam tulisan Maani (2011), pemberdayaan merupakan konsep alternatif pembangunan yang menekankan otonomi pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat. Berbasis pada sumber daya, partisipasi, demokrasi, dan pengalaman langsung, pemberdayaan fokus pada lokalitas, dimana masyarakat lebih siap diberdayakan dalam isu-isu lokal. Meskipun demikian, kekuatan ekonomi dan struktur luar masyarakat tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki daya tawar baik secara nasional maupun internasional. Konsep pemberdayaan muncul dari interaksi di tingkat ideologis dan praktis, antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, serta strategi pertumbuhan dan strategi yang berpusat pada masyarakat²⁷.

Konsep pemberdayaan memegang peranan krusial dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata, terutama di desa wisata. Unsur utama pemberdayaan termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Masyarakat lokal perlu didorong untuk terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka. Selain itu, pemberdayaan melibatkan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan agar mereka dapat berperan aktif dalam industri pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan mereka²⁸.

Pengakuan dan pemajuan budaya lokal juga menjadi bagian penting, dimana pelestarian dan promosi budaya lokal serta tradisi

²⁷ Karjuni Dt. Maani, 2011, "Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Demokrasi*, hlm. 53-66.

²⁸ A. Faidlal Rahman, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata," *Media Wisata* 6, no. 1 (12 Juni 2021), DOI.

menjadi aspek utama dalam menarik wisatawan. Akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan juga menjadi fokus, seiring dengan upaya menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga mereka dapat mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep pemberdayaan secara holistik dalam pengelolaan pariwisata desa, diharapkan masyarakat lokal dapat lebih berdaya dalam mengambil peran dalam pembangunan pariwisata, sambil menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

11. Perkembangan Pengaruh Strategis

a. Global

Globalisasi, terutama dalam bidang transportasi dan teknologi informasi komunikasi (TIK), memiliki dampak yang signifikan dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata. Pertama, aksesibilitas yang meningkat, berkat kemajuan transportasi seperti penerbangan murah dan infrastruktur transportasi yang lebih baik, membuka peluang baru bagi desa-desa wisata untuk menarik wisatawan dari berbagai negara. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan desa-desa wisata untuk mempromosikan diri secara lebih efektif kepada wisatawan potensial di seluruh dunia melalui media sosial, situs web, dan aplikasi perjalanan²⁹.

Ketiga, teknologi juga meningkatkan pengalaman wisatawan dengan layanan seperti aplikasi mobile dan pemandu virtual, meningkatkan daya tarik destinasi. Keempat, teknologi dapat digunakan dalam pengelolaan destinasi pariwisata secara lebih efisien melalui sistem manajemen reservasi online dan sistem informasi geografis, memungkinkan pengaturan lalu lintas wisatawan dan pemantauan dampak pariwisata secara lebih efektif. Terakhir, globalisasi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata melalui akses yang lebih luas terhadap informasi dan peluang,

²⁹ Herindiyah Kartika Yuni et al., "Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam Dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan," *BHAKTI PERSADA* 9, no. 1 (20 Maret 2023): 16–25, DOI.

mendorong partisipasi dalam layanan pariwisata dan pengembangan produk lokal. Namun, perlu diingat bahwa sambil memanfaatkan dampak positif globalisasi, penting untuk memperhatikan dampak negatif seperti homogenisasi budaya dan dampak lingkungan yang merugikan, serta memastikan bahwa pengelolaan pariwisata tetap berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Pemerintah negara maju seperti Inggris dan Jepang memiliki berbagai strategi yang holistik untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata. Strategi ini meliputi pengembangan infrastruktur wisata, seperti transportasi dan fasilitas umum, untuk memudahkan akses wisatawan ke desa wisata. Selain itu, mereka melakukan promosi dan pemasaran yang agresif untuk meningkatkan visibilitas desa wisata di tingkat nasional maupun internasional, serta menyediakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan bagi masyarakat lokal di desa wisata.

Dukungan keuangan, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman dengan suku bunga rendah, juga diberikan untuk memfasilitasi investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan dan pemasaran desa wisata, termasuk melalui pembentukan konsorsium pariwisata lokal dan program kemitraan publik-swasta. Melalui strategi-strategi ini, pemerintah berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata di desa wisata.

Komunitas global dan organisasi berskala global memainkan peran penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan pariwisata, termasuk di desa wisata. Komunitas global dan organisasi-organisasi seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Badan Pembangunan Internasional sering memberikan dana dan bantuan teknis untuk proyek pengembangan pariwisata di berbagai negara, termasuk di desa wisata. Mereka dapat memberikan dukungan dalam

pengembangan infrastruktur pariwisata, pelatihan keterampilan, dan pemulihan ekonomi setelah krisis.

Organisasi-organisasi global seperti Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dan Pusat Pariwisata Berkelanjutan (GSTC) berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi praktisi pariwisata, termasuk mereka yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Mereka menyediakan sumber daya, panduan, dan program pelatihan untuk membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

b. Regional

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Komunitas ASEAN 2015, yang pada awalnya dijadwalkan untuk tercapai pada tahun 2020, terjadi percepatan pelaksanaan menuju tahun 2015. Percepatan ini diresmikan melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, yang diadopsi dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007. Dokumen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan ASEAN menuju integrasi yang lebih erat dan komprehensif³⁰.

Kebijakan percepatan ini terutama didorong oleh keinginan untuk menciptakan ASEAN yang lebih terkoneksi dan terintegrasi, baik dari segi infrastruktur fisik maupun non-fisik. Komunitas ASEAN yang terhubung dengan baik diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, meningkatkan daya saing, serta memperkuat posisi ASEAN di tingkat global. Dengan percepatan tersebut, diharapkan ASEAN dapat berperan secara lebih efektif dalam menjawab tantangan-tantangan regional dan global yang semakin kompleks.

Salah satu konsep yang muncul sebagai hasil dari perencanaan percepatan ini adalah *ASEAN Connectivity*. Program ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas di seluruh wilayah ASEAN, baik melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi, maupun

³⁰ Haiyyu Darman Moenir, "Implementasi Asean Tourism Strategic Plan 2011-2015 Dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia Di Masa Pemerintahan Jokowi," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 6, no. 1 (1 Mei 2017): 57, DOI

kebijakan yang mengatasi hambatan-hambatan non-fisik, seperti regulasi perdagangan dan investasi yang harmonis³¹.

Dalam konteks ini, *ASEAN Connectivity* tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan transportasi, energi, dan komunikasi yang lebih baik di kawasan ASEAN, tetapi juga pada integrasi pasar, peningkatan mobilitas tenaga kerja, serta memperkuat konektivitas sosial dan budaya. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan efisiensi logistik, dan mempromosikan pertukaran pendapat serta budaya di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kemitraan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata, memainkan peran kunci dalam menguatkan industri pariwisata regional. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antarnegara, yang memungkinkan adopsi praktik terbaik dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, kerja sama dalam pengembangan produk wisata bersama dapat memperkaya destinasi dengan menonjolkan kekayaan budaya dan alam yang unik di wilayah ASEAN.

Pembangunan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi juga menjadi fokus kemitraan, memudahkan akses ke desa wisata dan meningkatkan fasilitas pendukung. Promosi bersama di tingkat regional dan internasional menjadi strategi efektif untuk meningkatkan visibilitas desa wisata, sementara pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat lokal mendukung profesionalisme dan kapasitas pengelolaan pariwisata. Dengan kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dapat memperkuat pengelolaan pariwisata di desa wisata, meningkatkan daya saing industri pariwisata regional, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat lokal di seluruh kawasan ASEAN.

c. Nasional

³¹ *Ibid.*

Berdasarkan pada gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra) yang berpengaruh kuat secara nasional, maka yang berpengaruh adalah:

1) Geografi : Tantangan dari aspek geografis untuk optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata, mencakup beberapa aspek yang saling terkait. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas, dimana banyak desa wisata terletak di daerah terpencil atau sulit dijangkau, mempengaruhi kunjungan wisatawan dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Infrastruktur yang terbatas seperti listrik, air bersih, dan sanitasi juga menjadi masalah, menghambat pengembangan fasilitas pariwisata. Selain itu, desa wisata sering kali rentan terhadap bencana alam, yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan wisatawan³². Konservasi alam dan lingkungan juga menjadi isu penting, dimana pengelolaan pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan daya tarik wisata. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis juga menjadi hambatan dalam mengelola pariwisata di desa wisata. Menghadapi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dan berkelanjutan.

2) Demografi : Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah merupakan potensi yang signifikan bagi pengembangan desa wisata. Dengan populasi yang besar, desa wisata memiliki pangsa pasar yang luas untuk menarik kunjungan wisatawan lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi di desa tersebut. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga berarti terdapat banyak individu yang dapat terlibat dalam berbagai usaha pariwisata di desa mereka sendiri. Para penduduk lokal dapat menjadi pemilik *homestay*, penyedia jasa kuliner, atau pelaku seni dan kerajinan lokal, yang

³² Winda Fuji Anggina, "Analisis Stabilitas Pariwisata Pedesaan Sebagai Kondisi Yang Sesuai Dengan Pariwisata Berkelanjutan," *Warta Pariwisata* 20, no. 2 (30 Desember 2022): 1–4, DOI.

semuanya memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat.

SDM yang berkualitas sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan desa wisata. SDM yang terampil dan terlatih dalam berbagai bidang seperti manajemen pariwisata, pemasaran, kerajinan tangan, dan pelayanan pelanggan, akan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman bagi wisatawan. Mereka juga akan membantu dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam desa tersebut. Namun, jika SDM di desa wisata kurang terlatih atau kurang memiliki keterampilan yang diperlukan, pengembangan pariwisata dapat terhambat dan layanan yang kurang memuaskan bagi wisatawan dapat terjadi.

3) Sumber Kekayaan Alam : Tantangan sumber daya alam terkait optimalisasi pengelolaan pariwisata, khususnya di desa wisata, dapat meliputi beberapa aspek. Pertama, risiko kerusakan lingkungan akibat peningkatan kunjungan wisatawan dan pembangunan infrastruktur pariwisata dapat mengancam keberlanjutan ekosistem alami di sekitar desa. Kedua, penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan air, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Ketiga, perubahan iklim juga dapat berdampak negatif pada sumber daya alam, seperti terjadinya banjir, tanah longsor, atau kenaikan suhu yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal³³.

4) Politik : Peran pemerintah daerah sering kali dianggap kurang efektif dalam pengelolaan pariwisata desa karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas, kurangnya koordinasi antar lembaga dan stakeholder terkait, serta masalah birokrasi dan regulasi yang kompleks. Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang lamban sering menghambat pengembangan pariwisata di tingkat desa. Political will yang kurang kuat juga bisa menjadi penghambat, dengan kebijakan yang tidak didukung secara kuat oleh pemimpin daerah atau adanya

³³ Agung Yoga Asmoro, "Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Terhadap Metode, Topik, Dan Aplikasinya."

kepentingan politik yang bertentangan. Solusi termasuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan koordinasi, penyederhanaan regulasi, dan dukungan politik yang kuat untuk kebijakan progresif dalam pengelolaan pariwisata di desa wisata.

5) Ekonomi : Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024, sektor pariwisata diharapkan dapat mencapai prestasi yang mengesankan pada tahun 2024. Diperkirakan bahwa jumlah kunjungan wisman akan berkisar antara 9,5 hingga 14,3 juta, sementara jumlah perjalanan wisnus diperkirakan mencapai 1,250 hingga 1,5 miliar. Target kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 diestimasi akan menghasilkan devisa sebesar US\$7,38 hingga US\$13,08 miliar, serta memberikan kontribusi sebesar 4,5% terhadap PDB dan menciptakan 22,8 juta lapangan kerja.³⁴ Pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap potensi pertumbuhan sektor tersebut dalam mendukung pembukaan lapangan kerja di tahun tersebut. Dengan meningkatnya investasi dan perhatian terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan akan terjadi pertumbuhan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

6) Sosial Budaya : Tradisi dan budaya masyarakat setempat memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan desa wisata. Tradisi dan budaya lokal sering kali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mengunjungi desa tersebut. Pengelolaan yang memperhatikan dan mempromosikan tradisi dan budaya lokal akan memberikan pengalaman autentik kepada wisatawan, meningkatkan daya tarik destinasi, dan memperkuat identitas masyarakat setempat. Selain itu, tradisi dan budaya juga menjadi dasar bagi berbagai kegiatan pariwisata seperti festival, pertunjukan seni, kuliner khas, dan kerajinan lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa.

³⁴ C S Purwowidhu, "Kian Melesat Di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi."

Sementara itu, pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan (IPTEK) dalam pengelolaan desa wisata juga tidak dapat diabaikan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, pengembangan keterampilan dalam industri pariwisata, dan pemahaman tentang praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan IPTEK dalam infrastruktur pariwisata seperti penggunaan teknologi informasi untuk promosi dan pemesanan, manajemen limbah, dan pengelolaan energi dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi wisatawan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

7) Hankam : TNI dan Polri memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi destinasi pariwisata, termasuk desa wisata, dari berbagai potensi ancaman seperti kejahatan, terorisme, dan gangguan keamanan lainnya. Kehadiran TNI di sekitar destinasi pariwisata tidak hanya memberikan rasa aman bagi wisatawan tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang esensial untuk pengembangan desa wisata. Sementara itu, Polri bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi di desa wisata, termasuk penyalahgunaan narkoba, perjudian ilegal, atau pelanggaran lainnya, serta menjaga ketertiban umum dan menangani konflik antara wisatawan dan masyarakat setempat. Dengan demikian, kolaborasi antara TNI dan Polri menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kenyamanan a pengunjung desa wisata.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar karena didukung oleh kekayaan alam dan keanekaragaman budaya. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI desa wisata Indonesia baru berjumlah 4.573 desa pada tahun 2023 dari

82.395 desa di Indonesia. Artinya, jumlah desa wisata masih cenderung kecil sehingga perlu dilakukan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Di satu sisi, potensi pariwisata yang sangat besar ini pun tidak sesuai dengan kontribusi terhadap PDB nasional yang masih kecil, khususnya pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, optimalisasi pariwisata diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor wisata di Indonesia sehingga kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional dapat turut optimal. Harapannya, sektor pariwisata dapat meningkatkan devisa negara. Lebih lanjut, melalui optimalisasi tata kelola sektor pariwisata pun diharapkan dapat mendorong Indonesia agar keluar dari *middle income trap*.

Sayangnya, realitanya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam tata kelola pariwisata. Terutama, terkait dengan anggaran, SDM, dan dukungan dari semua *stakeholders* terkait. Pada konteks desa wisata, masih diperlukan *branding* secara *soft-approach* maupun *hard-approach* untuk menggaet kedatangan Wisnus dan Wisman. Namun, dari segi anggaran, tidak semua desa wisata memiliki anggaran yang memadai sehingga diperlukan peran dari pemerintah pusat maupun daerah, swasta, dan lembaga-lembaga *think tank* untuk membangun kemitraan dan pendampingan. Selain itu, tidak semua pelaku usaha memahami konsepsi dalam pembangunan berkelanjutan sehingga menghambat realisasi pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenparekraf RI menjadikan pariwisata berbasis ekonomi hijau yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai prioritas pembangunan destinasi wisata.

Pada bab ini akan dilakukan elaborasi terhadap realitas pariwisata di Indonesia dari segi kebijakan, permasalahan dalam tata kelola pariwisata, dan langkah-langkah strategis dalam mendorong pariwisata berbasis ekonomi. Pada bagian realit kait kondisi pengelolaan pariwisata di Indonesia. Dari sub-bahasan ini akan menekankan pada penjelasan arah kebijakan pariwisata saat ini dan relevansinya dengan ekonomi hijau sebagai paradigma dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan pada bagian permasalahan akan lebih menekankan pada tantangan dan hambatan yang dialami dalam tata kelola pariwisata berbasis ekonomi hijau di Indonesia. Terakhir, bahasan langkah

strategis yang diharapkan dapat menghasilkan solusi dalam tata kelola sektor pariwisata berkelanjutan. Solusi yang diuraikan akan menjelaskan secara detail peran dari beberapa kementerian terkait, yakni Kemenparekraf, Kemendes PDTT, Kemen LHK, Kemenkeu, Kemen PUPR, Kemenkop UKM, dan DPR untuk mendorong tata kelola pariwisata berkelanjutan.

13. Kondisi Pengelolaan Pariwisata di Indonesia Saat Ini Dalam Mendukung *Green economy*.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah desa wisata yang telah terdata dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) di Indonesia tahun 2023 mencapai 4.573 desa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka 3.419 desa. Pada forum peluncuran Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2024, Kemenparekraf pun menyampaikan bahwa jumlah desa wisata di Indonesia akan terus bertambah karena masih adanya desa-desa yang belum terdaftar dalam Jadesta. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi proses administratif, maka Kemenparekraf pun turut melakukan “Kampanye Sadar Wisata 5.0” untuk mendorong mentalitas dan karakter masyarakat desa dalam pengembangan pariwisata. Kampanye ini pun dilakukan untuk mendorong terwujudnya pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan (*ekowisata*)³⁵.

Besarnya potensi desa wisata Indonesia dapat menjadi peluang dalam internalisasi nilai dan prinsip ekonomi hijau pada masyarakat di tingkat lokal. Dalam hal ini, pengembangan desa wisata dan ekonomi hijau dapat berjalan secara simultan di masyarakat melalui pembentukan pariwisata berkelanjutan. Keberadaan desa wisata harus menjadi subjek dan objek dalam pelaksanaan program-program berbasis SDGs yang telah menjadi agenda nasional Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 dan tertulis dalam Perpres No 111 Tahun 2022 yang menjadi bagian dari konsepsi pembangunan berkelanjutan. Desa wisata di Indonesia dapat mengadopsi prinsip 5P dalam tata kelolanya, yakni

³⁵ | Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf: Kampanye Sadar Wisata 5.0 Tingkatkan Ketangguhan Desa Wisata Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Kemenparekraf RI. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-kampanye-sadar-wisata-50-tingkatkan-ketangguhan-desa-wisata-sebagai-penggerak-ekonomi-masyarakat>

*people, prosperity, planet, peace, and partnership*³⁶. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan dapat terbentuk desa wisata yang berorientasi ekonomi hijau dengan harapan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan desa wisata yang berbasis pada ekonomi hijau, pemerintah melalui Kemenparekraf telah menyusun beberapa langkah strategis yang dapat diklasifikasikan pada tujuh aspek:

a. Aspek sumber daya manusia

Aspek SDM merupakan salah satu fokus pembangunan kepariwisataan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan paparan Kemenparekraf dalam Rapat Perencanaan APBN 2024 bersama Komisi X DPR RI bahwa prioritas kegiatan pengembangan pariwisata diantaranya Parekraf berkelanjutan, penciptaan nilai tambah (*value-adding*), transformasi digital, serta peningkatan produktivitas. Prioritas pengembangan pariwisata yang ingin dicapai pun sesuai dengan kepentingan nasional yang tercantum dalam empat pilar Visi Indonesia 2045 yang mencakup: 1) pembangunan SDM dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); 2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; 3) pemerataan pembangunan; dan 4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan³⁷. Oleh karena itu, dari segi pengembangan SDM, maka fokusnya adalah digitalisasi desa wisata dan pengembangan produk wisata untuk meningkatkan Wisnus dan Wisman. Hal ini dilakukan melalui pendampingan peningkatan kapasitas SDM terhadap desa wisata di Indonesia untuk transformasi pembayaran digital, pemasaran digital, dan gencar membuat konten-konten di media sosial. Dalam sosialisasi bertajuk “Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Jejaring Desa Wisata di Kota Tegal”, Kemenparekraf menekankan bahwa untuk mencapai hal ini

³⁶ Basuki Antariksa, dkk. (2023). *Policy Paper: Pemetaan Kapasitas SDM Pariwisata Hijau Bagi Desa Wisata Menuju Ekonomi Sirkular*. Direktorat Kajian Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. hlm 10.

³⁷Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Visi Indonesia 2045* [Disampaikan dalam orasi ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia]. Kementerian PPN/Bappenas. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPaparannyaMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf>

diperlukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi³⁸. Caranya dapat melalui kemitraan maupun kerjasama dengan NGO/LSM, kampus, dan *influencer*. Lebih jauh, pemerintah daerah pun dapat mengajukan permohonan asistensi kepada K/L terkait untuk turut mendorong peningkatan kualitas SDM desa wisata di daerahnya. Intinya, sinergi antara pusat, daerah, dan lembaga eksternal harus terbangun dalam tata kelola sektor pariwisata, khususnya desa wisata.

b. Sarana dan prasarana

Kelengkapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong keberadaan Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman). Oleh karena itu, Kemenparekraf, Kemen PUPR, dan Kemenhub turut menjalin kerja sama untuk memenuhi akses, sarana, maupun dukungan transportasi menuju wisata-wisata Indonesia. Utamanya, pariwisata yang termasuk kedalam prioritas dan super-prioritas. Bersama Kemenhub, Kemenparekraf terus mendorong ketersediaan pesawat domestik menuju destinasi wisata. Selain itu, kemenparekraf pun turut melakukan evaluasi agar pemerintah dapat memberikan subsidi harga tiket destinasi wisata domestik. Hal ini karena masyarakat sering kali mengeluhkan karena harga tiket ke luar negeri cenderung lebih murah dibandingkan domestik. Misalnya, tiket antara Jakarta-Batam dengan Jakarta-Singapura yang sangat jauh perbedaan harganya. Di satu sisi, Kemenparekraf pun mendorong agar terdapat akses-akses alternatif maupun maskapai lain yang dapat menjadi pilihan wisatawan. Sedangkan, bersama Kemen PUPR, Kemenparekraf berusaha meningkatkan fasilitas pariwisata, seperti akses, *homestay* atau hotel, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan Kemenparekraf, telah dialokasikan anggaran sebesar 2,34 triliun untuk pembangunan jalan mendukung konektivitas destinasi wisata. Selain itu, diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk turut

³⁸ | Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (2022). *Siaran Pers : Kemenparekraf Dorong Peningkatan Kualitas Desa Wisata di Tegal Jateng*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-dorong-peningkatan-kualitas-desa-wisata-di-tegal-jateng>

menunjang amenities di daerah wisata³⁹.

c. Tumpang tindih regulasi

Pasca Covid-19, Kemenparekraf telah banyak melakukan penyesuaian, khususnya dari segi regulasi dan kebijakan. Hal ini sejalan dengan peluncuran “*Roadmap Blue, Green, and Circular Economy (BGCE)*” oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP. Dokumen ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan rendah karbon. Selain itu, pasca terbitnya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang difokuskan pada 5 (lima) Daerah Pariwisata Super Prioritas (DSP) yang terdiri dari Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupan. Penetapan DSP ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional yang tercakup dalam 4 (empat) agenda: 1) Penguatan ketahanan ekonomi demi pertumbuhan yang berkualitas dan merata; 2) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM; 3) perbaikan lingkungan dan ketahanan bencana-iklim; dan 4) perkuatan stabilitas urusan politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik⁴⁰. Sebagai bentuk penyesuaian dari RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf pun turut melakukan fokus pada peningkatan SDM kepariwisataan melalui SDM Hijau atau *green human resources* agar dapat menunjang konsepsi pembangunan berkelanjutan. Pada konteks ini, Kemenparekraf menekankan bahwa setiap pelaku wisata harus memiliki sikap pro-lingkungan. Salah satu contohnya, dalam RIDPN Raja Ampat telah termuat terkait pariwisata dan SDM hijau⁴¹.

d. Potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan

Tata kelola sektor pariwisata berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam sesuai dengan misi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena

³⁹ | Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf Tingkatkan Kesiapan Aksesibilitas di Destinasi Wisata untuk Jaring Wisatawan*. Kemenparekraf RI. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-tingkatkan-kesiapan-aksesibilitas-di-destinasi-wisata-untuk-jaring-wisatawan>

⁴⁰ *Ibid*, hlm 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm 34.

itu, dalam pengembangan pariwisata, Kemenparekraf pun mendorong terciptanya pariwisata hijau. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 yang bertajuk “Indonesia Maju Bersama Parekraf Hijau”. Dalam Rakornas ini, dibahas 5 (lima) hal yang menjadi pedoman pengembangan pariwisata, yaitu 1) Krisis Iklim dan Dekarbonisasi (*Green*); 2) *Archipelago and Island Tourism Development (Blue)*; 3) *New Trends: Digital, Regenerative, Niche Tourism, Event Tourism, Health & Medical, Marine, Eco Heritage Regeneration*; 4) Sumber Daya Manusia; dan 5) Hak Kekayaan Intelektual⁴². Melalui pengembangan pariwisata hijau, Parekraf pun berharap terciptanya sektor pariwisata baru yang dapat mendongkrak kontribusi pariwisata dalam PDB nasional. Pada prakteknya, pengembangan pariwisata hijau ini terkait dengan upaya untuk mewujudkan *regenerative tourism*⁴³. Hal ini menekankan pada kewajiban destinasi wisata untuk melakukan praktek ekonomi sirkular, bijak sampah melalui daur ulang, kualitas sanitasi, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

e. Peran dan dukungan kelembagaan belum optimal

Dalam pengelolaan pariwisata diperlukan komitmen yang kuat dari banyak pihak untuk merealisasikan program maupun kebijakan, serta perencanaan yang telah tertera dalam RIDPN. Apabila secara spesifik menekankan pada pengelolaan desa wisata, maka perlu ada kesesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan perencanaan pusat. Artinya, kebijakan daerah harus selalu *in line* dengan kepentingan nasional. Terutama, untuk wisata-wisata yang masuk dalam kategori prioritas dan super-prioritas. Hal ini karena pusat dan daerah sifatnya saling mempengaruhi dan dipengaruhi (*push and pull factors*)⁴⁴. Di satu sisi, kolaborasi pun

⁴² Kemenparekraf RI. (2024, February 5). *Mewujudkan Parekraf Hijau 2024, Bagaimana Implementasinya?* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/mewujudkan-parekraf-hijau-2024-bagaimana-implementasinya>

⁴³ Radyahadi dan Nurfara. (2024). Implementation of Regenerative Tourism in the Development of Tourism Destinations in Indonesia. *International Journal of Sustainable Competitiveness in Tourism*, 3(1), 1-10.

⁴⁴ Andre Ariesmansyah, dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa

harus dilakukan bersama lembaga eksternal, baik dari swasta atau korporasi, NGO/LSM, maupun akademisi dan kampus. Keterlibatan swasta diperlukan utamanya dari segi dukungan pendanaan untuk pengembangan desa wisata. Selanjutnya, NGO/LSM diperlukan untuk melakukan pendampingan teknis yang fokusnya pada pemberdayaan para pelaku usaha.

f. Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat belum meningkat signifikan

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat dalam konteks peningkatan desa wisata berbasis green economy masih belum mencapai peningkatan yang signifikan. Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa langkah untuk mencapai hal ini, antara lain melalui Program Penguatan Ekonomi Lokal (Prokel) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat desa wisata dalam pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya lainnya termasuk penyelenggaraan pameran dan festival desa wisata guna mempromosikan destinasi ini kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

g. Kolaborasi lintas sektoral belum optimal

Pada aspek ini, Kemenparekraf telah menyusun Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) yang didalamnya menjelaskan secara rinci tata kelola pariwisata di Indonesia. Dalam RIDPN ini, Kemenparekraf pun melakukan pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas, serta 17 K/L lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebijakan kepariwisataan nasional. Bahkan, penyusunan RIDPN ini pun turut bekerja sama dengan *Bank Dunia* untuk mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi dengan fokus pada peningkatan kapasitas, akses, partisipasi masyarakat, dan ekosistem

investasi yang kondusif sesuai agenda nasional⁴⁵.

Untuk mendukung semua rencana ini, Kemenparekraf telah mengajukan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2024, yakni sebesar 3,53 triliun. Besaran pagu Kemenparekraf mengalami kenaikan karena pada periode sebelumnya berada pada angka 3,41 triliun. Merujuk pada surat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 diputuskan bahwa pagu anggaran Kemenparekraf dalam APBN 2024 disetujui. Di samping itu, Kemenparekraf pun mengajukan anggaran belanja untuk pegawai sebesar 408,32 triliun, kebutuhan belanja untuk barang 2,38 triliun, dan kebutuhan modal 744,5 miliar. Terkait kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM kepariwisataan, maka Kemenparekraf mengajukan anggaran tambahan sebesar 117,34 miliar⁴⁶.

Meskipun demikian, pengembangan desa wisata masih memiliki beberapa tantangan di lapangan. Salah satunya, terkait anggaran yang dimiliki desa wisata cenderung tidak cukup untuk melakukan terobosan maupun promosi secara khusus. Salah satu yang mengeluhkan permasalahan ini adalah Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Bali. Menurut Forkom Dewi, dari 238 desa wisata yang ada di Bali hanya satu atau dua saja yang sudah dikenal publik. Oleh karena itu, Forkom Dewi Bali menilai bahwa diperlukan promosi yang serius untuk membangun *branding* atau *image* terhadap desa wisata. Sayangnya, promosi khusus ini tidak dapat dibebankan kepada pengelola desa wisata karena minimnya anggaran operasional. Oleh karena itu, diperlukan bantuan anggaran dari pemerintah secara khusus⁴⁷.

Masalah lainnya, yakni desa wisata yang ada di Indonesia cenderung masih sekadar “nama” atau *labelling* saja. Namun, pada prakteknya masih belum mengadopsi unsur-unsur kepariwisataan secara terintegrasi sebagaimana yang ditetapkan Kemenparekraf. Di satu sisi, banyak desa

⁴⁵ *Ibid*, hlm 11.

⁴⁶ Sinta Ambarwati. (2023, September 12). *DPR RI setuju anggaran definitif Kemenparekraf 2024 Rp3,53 triliun*. Antaranews.com. Retrieved May 21, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/3724191/dpr-ri-setujui-anggaran-definitif-kemenparekraf-2024-rp353-triliun>

⁴⁷ I Made Mendra Astawa., (2023). *Minim Dana, Promosi Desa Wisata Belum Optimal*. NusaBali.com. Retrieved May 21, 2024, from <https://www.nusabali.com/berita/151080/minim-dana-promosi-desa-wisata-belum-optimal>

wisata hanya berfokus pada satu basis saja. Misalnya, di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Tuban yang berbasis religi hanya menjual satu saja “religi”. Sedangkan, secara konsep, desa wisata harusnya mampu mengembangkan dan mengintegrasikan potensi lain yang ada di daerah sehingga menjadi satu-kesatuan⁴⁸. Oleh karena itu, diperlukan asistensi maupun pendampingan intensif dari Kemenparekraf maupun *stakeholders* terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman Pemda, Dinas, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Dukungan Presiden Joko Widodo dalam realisasi pariwisata berkelanjutan sangatlah besar. Pada 13 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan beberapa Menteri, utamanya Menparekraf RI. Dalam rapat tersebut Presiden menekankan bahwa diperlukan entitas tunggal dalam pengelolaan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yakni pariwisata Borobudur. Presiden meminta kepada Menparekraf untuk menyiapkan dokumen pendukung dalam menentukan *single destination management* yang nantinya akan didukung oleh Perpres. Alasan presiden menjadikan pengelolaan kawasan wisata Borobudur berentitas tunggal adalah untuk tata kelola yang terintegrasi, serta mewujudkan pariwisata Borobudur yang memiliki aspek budaya, konservasi, dan berkelanjutan. Arahan lain yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo adalah percepatan pemenuhan dokumen *heritage impact assessments* agar segera mendapatkan *approve* dari UNESCO⁴⁹.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis ekonomi hijau sangatlah serius digarap oleh Indonesia. Hal tersebut disampaikan melalui forum “*Bloomberg New Economy Forum*” tahun 2023 di Singapura. Sandiaga yang berperan sebagai pembicara menyampaikan bahwa selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, pariwisata

⁴⁸ Purwanto. (2021). *Konsep Desa Wisata Belum Optimal*. Radar Bojonegoro. Retrieved May 21, 2024, from <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711315219/konsep-desa-wisata-belum-optimal>

⁴⁹ Sekretariat Kabinet RI. (2023, June 14). *Dorong Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Presiden Minta Borobudur Dikelola Entitas Tunggal*. Sekretariat Kabinet. Retrieved May 21, 2024, from <https://setkab.go.id/dorong-destinasi-pariwisata-berkelanjutan-presiden-minta-borobudur-dikelola-entitas-tunggal/>

hijau pun turut mendongkrak sektor ekonomi baru (*new economy*). Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan bahwa sektor pariwisata hijau akan menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*). Menurutnya, hal ini pun menciptakan peluang ekonomi dan investasi yang baru, serta membentuk ekosistem kolaborasi positif⁵⁰. Hal ini karena penerapan pariwisata hijau dapat turut mendorong misi global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan relevan dengan kepentingan Indonesia yang sedang mengembangkan EBT. Oleh karena itu, sebagai Menparekraf RI, ia meyakini bahwa pengembangan pariwisata hijau akan berdampak besar di masa depan. Terutama, turut mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebelum Pandemi Covid-19, sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Bahkan, *Organizations for Economic Co-Operation and Development* (OECD) pada laporannya “Tourism Trends and Policies 2022” menyebutkan bahwa pada tahun 2019 sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa utama dalam perekonomian yang nilainya mencapai 5,0% dari PDB. Sayangnya, ketika munculnya Covid-19 yang disertai kebijakan restriksi internasional, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB mengalami penurunan 56% atau hanya 2,2% saja. Kondisi ini terus berlanjut sampai tahun 2021 yang menunjukkan Indonesia berada posisi kritis karena hanya mendapatkan 1,5 juta kunjungan Wisman. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 ini trend wisata ke Indonesia mulai mengalami kenaikan, termasuk dari Wisman maupun Wisnus. Pada tahun 2022, kunjungan Wisman maupun Wisnus di atas target, yakni mencapai 5,5 juta. Selain itu, Wisnus yang hanya ditargetkan 550 juta perjalanan, justru melampaui target menjadi 800 juta perjalanan⁵¹. Hal ini tentu berdampak positif terhadap keberlangsungan ekonomi di daerah-daerah wisata dan nasional secara kumulatif.

Potensi sektor pariwisata yang dimiliki Indonesia harus dioptimalkan

⁵⁰ Farhan Arda Nugraha. (2023). *Menparekraf: Pariwisata hijau buka lebih banyak peluang kerja*. Antara News. Retrieved May 21, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/3817683/menparekraf-pariwisata-hijau-buka-lebih-banyak-peluang-kerja>

⁵¹ C.S. Purwowidhu. (2023, May 16). *Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi*. Media Keuangan. Retrieved May 21, 2024, from <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>

agar dapat berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Hal ini karena optimalisasi sektor pariwisata akan memberikan efek domino berupa peningkatan konsumsi terhadap sektor-sektor lain. Terutama, sektor 17 subsektor ekonomi kreatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komitmen dalam pengelolaan pariwisata bukan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dinas, swasta, kampus, dan masyarakat lokal. Di satu sisi, untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang, maka tata kelola sektor pariwisata harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Artinya, pengelolaan pariwisata harus disertai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan membangun model-model desa wisata yang berorientasi pada praktek ekowisata dan bioekonomi sebagai bagian dari paradigma ekonomi hijau.

Upaya untuk mengoptimalkan sektor pariwisata dapat dilakukan melalui proses integrasi dengan kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan desa wisata. Dalam hal ini, teknologi harus menjadi instrumen penting dalam kegiatan pelayanan, pengembangan, promosi, dan lain sebagainya yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas pariwisata. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha sektor pariwisata sangatlah diperlukan untuk mewujudkan pemberdayaan. Lebih lanjut, fasilitas fisik atau infrastruktur pun harus ditingkatkan agar memudahkan akses terhadap destinasi wisata. Hal ini pun tentu perlu ditopang oleh kesediaan transportasi menuju lokasi wisata, *homestay/hotel*, *restoran*, *MICE*, dan fasilitas pendukung lainnya yang memberikan kenyamanan dan kemudahan. Infrastruktur dan sarana harus dipenuhi karena turut menjadi misi regional dalam gerakan *ASEAN Connectivity*. Konektivitas bukan hanya tentang jalan, tetapi juga hubungan diplomatik atau kemitraan yang dapat dibangun untuk tata kelola sektor pariwisata berkelanjutan yang lebih baik.

14. Faktor Penyebab Akar Masalah Dalam Pengelolaan Pariwisata dan Dampaknya terhadap *Green Economy*.

Pengembangan desa wisata di Indonesia masih belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor umum yang saling berkaitan. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di sektor ini masih terbatas, baik dalam hal

keterampilan, pengetahuan, maupun pengalaman dalam mengelola dan mempromosikan pariwisata desa. Kedua, tata kelola dan manajemen desa wisata sering kali kurang efektif, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, tantangan lingkungan juga memainkan peran penting, di mana aspek-aspek seperti keberlanjutan, konservasi alam, dan penanganan limbah belum sepenuhnya diperhatikan. Faktor-faktor ini secara kolektif menghambat perkembangan desa wisata yang potensial, padahal sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal dan melestarikan budaya serta alam setempat.

Pemerintah, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menekankan pentingnya pengembangan desa wisata yang memperhatikan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini penting untuk mempertahankan daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap keberlanjutan jangka panjang masyarakat desa wisata. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa pengembangan desa wisata tidak seharusnya hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan desa⁵². Selain itu, Abdul Halim Iskandar juga menyoroti beberapa kelemahan lain, seperti kurangnya narasi dan promosi desa wisata, yang merupakan elemen penting untuk menarik minat wisatawan.

Senator asal DIY, Hilmy Muhammad, yang dikenal sebagai Gus Hilmy, juga menyampaikan kritik serupa mengenai lambatnya pengembangan sektor pariwisata. Ia menyoroti kualitas sumber daya manusia dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang dinilai kurang memadai⁵³. Selain itu, Hilmy mencatat bahwa atraksi, amenities, dan aksesibilitas di sektor pariwisata belum berkembang secara optimal. Sebagai contoh, akses internet di destinasi wisata religius seperti Makam Imogiri dan Giriloyo di Bantul masih perlu ditingkatkan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan

⁵² Mediana, "Bangun Desa Wisata, Kelestarian Lingkungan Jangan Diabaikan," *kompas.id*, 9 September 2022, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2024, pukul 07.32 WIB.

⁵³ Abdul Hamied Razak, "Kritik Gus Hilmy Untuk Pariwisata DIY," *Harianjogja.com*, 15 September 2020, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2024, pukul 07.49 WIB.

potensi besar desa-desa wisata di Indonesia. Sandiaga bahkan memprediksi peningkatan kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata hingga 30 persen dari wisatawan lokal pada tahun mendatang⁵⁴. Hal ini wajar mengingat Indonesia yang kaya akan keindahan panorama alam, situs sejarah yang sarat makna, dan berbagai potensi wisata lainnya, terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu, pengembangan destinasi wisata, termasuk desa wisata, harus didasarkan pada konsep keberlanjutan. Pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Aspek ekologi tersebut berhubungan dengan ancaman *Over Tourism* pada Desa Wisata, yang merupakan situasi yang terjadi ketika jumlah wisatawan melebihi kapasitas daya dukung yang dimiliki desa tersebut, memberikan dampak negatif yang signifikan. Ancaman tersebut mencakup kerusakan lingkungan karena tekanan besar terhadap sumber daya alam, seperti ekosistem alami yang rusak dan penurunan kualitas air serta udara. Selain itu, terjadi pula risiko kehilangan keaslian budaya karena adanya komersialisasi budaya lokal yang mungkin diadopsi untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Ketegangan sosial juga mungkin muncul, terutama jika infrastruktur dan layanan publik tidak mampu menangani beban yang tinggi dari jumlah wisatawan yang datang. Kehilangan kelestarian sumber daya alam dan budaya juga menjadi ancaman serius, mengancam daya tarik utama desa wisata.

Sebagai contoh, tekanan dari *tourist gaze* dapat membuat desa wisata kesulitan dalam membangun narasi yang sesuai dengan keunikan masing-masing. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 24 kampung tematik di Kota Malang, Jawa Timur, hanya sedikit yang benar-benar sukses dan berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi masyarakatnya.⁵⁵ Kampung Warna-warni Jodipan adalah salah satunya yang berhasil membangun narasi yang relevan dengan kondisi mereka, yaitu

⁵⁴ Redaksi, "Desa Wisata Sebagai Idola Baru," *kompas.id*, 12 September 2022, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2024, pukul 07.53 WIB.

⁵⁵ Rusydan Fathy, "Jebakan Eksploitasi Ruang Di Desa Wisata," *Tempo*, 13 Oktober 2023, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2023, pukul 07.59 WIB.

tentang "mengubah citra kumuh menjadi lingkungan estetik". Namun, sebagian besar dari 23 kampung lainnya hanya meniru mentah-mentah narasi tersebut tanpa memperhitungkan konteks lokal mereka.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya pada Poin 13, terdapat beberapa akar permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan desa wisata berbasis *green economy* ini.

1. Pertama, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Meskipun telah ada upaya pengembangan SDM melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas di desa wisata, akar permasalahan utama terletak pada kurangnya kesiapan dan keterbatasan sumber daya lokal untuk mengimplementasikan transformasi ini. Banyak desa wisata masih menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi digital, baik dari segi infrastruktur maupun pengetahuan. Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang diberikan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal, mengakibatkan kurangnya adaptasi dan penerapan yang efektif di lapangan.

2. Akar Permasalahan Sarana dan Prasarana.

Meskipun ada investasi besar dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, ketimpangan dalam distribusi infrastruktur antara destinasi wisata prioritas dan wilayah lainnya merupakan akar permasalahan. Fokus pengembangan masih terkonsentrasi pada destinasi super-prioritas, sementara banyak daerah dengan potensi wisata besar belum mendapatkan perhatian yang memadai. Ini menyebabkan kesenjangan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan, sehingga menghambat pertumbuhan pariwisata di wilayah yang belum berkembang.

3. Penyebab Terjadinya Tumpah Tindih Regulasi.

Tumpang tindih regulasi di sektor pariwisata disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Setiap level pemerintahan sering kali memiliki agenda dan prioritas yang berbeda, sehingga regulasi yang diterapkan tidak selalu selaras dan bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat implementasi kebijakan, serta menghambat pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

4. Akar Permasalahan Potensi Eksploitasi dan Kerusakan Lingkungan.

Akar permasalahan dari potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan dalam sektor pariwisata adalah kurangnya penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan secara konsisten di seluruh destinasi wisata. Meskipun ada inisiatif untuk mengembangkan pariwisata hijau, banyak destinasi belum memiliki mekanisme pengelolaan yang efektif untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku industri dalam menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan.

5. Peran dan Dukungan Kelembagaan yang Belum Optimal.

Akar masalah dalam peran dan dukungan kelembagaan yang belum optimal adalah lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Banyak program dan inisiatif yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan. Selain itu, dukungan dari sektor swasta, NGO, dan akademisi sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal, karena kurangnya platform kolaboratif yang efektif untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan sumber daya.

6. Kurangnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Setempat.

Akar permasalahan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat adalah kurangnya pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pengembangan desa wisata. Program yang ada sering kali lebih berfokus pada peningkatan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan. Akibatnya, manfaat yang diperoleh masyarakat dari pengembangan pariwisata tidak merata, dan kesejahteraan jangka panjang mereka tidak terjamin.

7. Kolaborasi Lintas Sektoral yang Belum Optimal.

Akar permasalahan dalam kolaborasi lintas sektoral yang belum optimal terletak pada silo mindset atau pola pikir yang terkotak-kotak antar lembaga dan sektor. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya kerja

sama, banyak institusi masih cenderung bekerja secara terpisah, dengan prioritas dan target yang tidak selalu selaras. Hal ini menghambat terjadinya sinergi yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta memperlambat pencapaian tujuan nasional dalam sektor ini.

Pengelolaan desa wisata dalam upaya mendukung *green economy* dipengaruhi oleh beberapa faktor spesifik yang penting. Jumlah penduduk di desa wisata memiliki dampak langsung pada kapasitas lingkungan dan infrastruktur. Desa dengan penduduk yang lebih banyak akan memiliki lebih banyak sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan pariwisata, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah. Sebaliknya, desa dengan penduduk yang lebih sedikit mungkin lebih mudah mempertahankan keasrian lingkungan, tetapi menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan ekonomi⁵⁶.

Kemajuan ekonomi di desa wisata sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, memungkinkan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan fasilitas wisata yang ramah lingkungan. Kemajuan teknologi juga memainkan peran kunci, membantu desa wisata mengelola sumber daya alam secara efisien melalui penggunaan teknologi hijau seperti energi terbarukan dan sistem pengelolaan limbah yang canggih. Peraturan lingkungan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten memastikan pengelolaan desa wisata berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk perlindungan ekosistem lokal dan pengelolaan limbah⁵⁷.

Urbanisasi membawa infrastruktur yang lebih baik dan akses ke pasar yang lebih luas, namun harus dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Berdasarkan konsep pemberdayaan, struktur industri yang mendukung pariwisata, seperti kerajinan tangan dan kuliner lokal, dapat meningkatkan daya tarik wisatawan,

⁵⁶ Ahmadintya Anggit Hanggraito, Eka Afrida Ermawati, and Esa Riandy Cardias, "Pengembangan Blueprint Wisata Desa Dan Paket Wisata Sebagai Upaya Akselerasi Desa Tambong Sebagai Desa Wisata," *Pamasa : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (27 Juni 2023): 1, DOI.

⁵⁷ Winda Fuji Anggina, "Analisis Stabilitas Pariwisata Pedesaan Sebagai Kondisi Yang Sesuai Dengan Pariwisata Berkelanjutan," *Warta Pariwisata* 20, no. 2 (30 Desember 2022): 1–4, DOI.

sementara desa yang dekat dengan industri berat harus lebih waspada terhadap dampak lingkungan⁵⁸. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dapat membawa modal dan teknologi untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, tetapi harus tetap menghormati kepentingan lokal dan lingkungan setempat⁵⁹. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, desa wisata dapat dikelola secara efektif untuk mendukung *green economy*, menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Namun di sisi lain, belum optimalnya pengelolaan desa wisata di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap perwujudan *green economy*, yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, dari **perspektif *green economy***, kerusakan lingkungan dan potensi bencana menjadi isu serius⁶⁰. Tanpa pengelolaan yang tepat, desa wisata dapat mengalami degradasi lingkungan akibat *over tourism* dan praktik yang tidak berkelanjutan. Misalnya, meningkatnya jumlah wisatawan tanpa batasan yang jelas dapat merusak ekosistem lokal, menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya biodiversitas. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan dapat memperburuk dampak perubahan iklim, meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga mengurangi daya tarik wisata yang menjadi sumber utama pendapatan desa.

Kedua, dari **perspektif pemberdayaan masyarakat**, komersialisasi desa tanpa melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat dapat menyebabkan penderitaan bagi penduduk lokal⁶¹. Ketika desa wisata dikembangkan dengan fokus utama pada keuntungan ekonomi tanpa partisipasi aktif masyarakat, penduduk lokal sering kali hanya menjadi

⁵⁸ A. Faidlal Rahman, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata," *Media Wisata* 6, no. 1 (12 Juni 2021), DOI.

⁵⁹ Novia Purbasari dan Asnawi Manaf, "Karakteristik Elemen Sistem Pariwisata Ekowisata Desa Wisata Nglangeran Dan Wisata Desa Pada Desa Wisata Pentingsari," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 13, no. 1 (10 Maret 2017): 100, DOI.

⁶⁰ Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia, "Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata di Provinsi Lampung Dan Jawa Barat)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (14 November 2021): 546, DOI.

⁶¹ Ahmadintya Anggit Hanggraito, Eka Afrida Ermawati, dan Esa Riandy Cardias, "Pengembangan Blueprint Wisata Desa Dan Paket Wisata Sebagai Upaya Akselerasi Desa Tambong Sebagai Desa Wisata."

penonton dalam proses tersebut. Mereka akan kehilangan akses ke sumber daya alam yang sebelumnya mereka manfaatkan, dan identitas budaya mereka dapat terancam oleh komersialisasi. Akibatnya, alih-alih memperoleh manfaat dari pariwisata, masyarakat lokal justru menderita karena kehilangan kendali atas tanah dan budaya mereka, serta tidak mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan pariwisata.

Ketiga, dari **perspektif manajemen**, peluang untuk memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) di sektor pariwisata sering kali terlewatkan. Desa wisata yang dikelola secara optimal dapat menjadi contoh penerapan teknologi hijau, seperti panel surya untuk listrik atau pengelolaan limbah yang efisien. Namun, kurangnya pengetahuan dan investasi dalam teknologi ini berarti banyak desa wisata tidak memanfaatkan EBT, sehingga mereka tetap bergantung pada sumber energi konvensional yang tidak ramah lingkungan⁶². Hal ini tidak hanya meningkatkan jejak karbon desa wisata, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk mengurangi biaya operasional dan menciptakan model pariwisata berkelanjutan.

Keempat, dari **perspektif pemberdayaan**, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sering kali rendah akibat pengelolaan desa wisata yang tidak optimal⁶³. Ketika pariwisata tidak dikelola dengan baik, pendapatan yang dihasilkan tidak merata dan sering kali hanya menguntungkan segelintir pihak. Tanpa strategi yang jelas untuk mendistribusikan keuntungan pariwisata kepada seluruh komunitas, banyak penduduk desa tetap hidup dalam kemiskinan meskipun desa mereka menjadi tujuan wisata. Kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja di sektor pariwisata juga berarti masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat maksimal dari keberadaan wisatawan.

Pada dasarnya, pengelolaan desa wisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif terhadap perwujudan *green economy*, yang mencakup berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari berbagai sudut pandang. Dari perspektif lingkungan, pengelolaan desa wisata

⁶² Ratna Diyah Palupi dan Ira Risfandi, "Strategi Pengembangan Wisata Bahari Desa Namu Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Sadar Wisata," *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 14, no. 1 (9 September 2019): 8–14, DOI.

⁶³ Ahmadintya Anggit Hanggraito, Eka Afrida Ermawati, dan Esa Riandy Cardias, "Pengembangan Blueprint Wisata Desa Dan Paket Wisata Sebagai Upaya Akselerasi Desa Tambong Sebagai Desa Wisata."

secara berkelanjutan dapat membawa manfaat besar bagi pelestarian lingkungan alam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan, desa wisata dapat menjadi contoh praktik yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, adopsi pertanian organik dan energi terbarukan di desa wisata dapat mengurangi polusi dan degradasi lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana terhadap ekosistem alam juga dapat membantu mempertahankan keanekaragaman hayati dan melindungi habitat spesies-spesies yang terancam punah.

Selain itu, dari perspektif ekonomi, pengelolaan desa wisata dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam industri pariwisata, desa wisata dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, melalui promosi produk-produk lokal dan kerajinan tangan, desa wisata dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Dari perspektif sosial, pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi penduduk lokal, desa wisata dapat meningkatkan akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan meningkatkan standar hidup mereka. Selain itu, desa wisata juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya, mempromosikan pertukaran budaya antar wisatawan dan penduduk lokal, serta memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, pemetaan peluang dan kendala menjadi penting untuk mendorong pembangunan pariwisata desa wisata berbasis *green economy* yang lebih baik. *Pertama*, pada aspek **Strengths (Kekuatan)**, Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan SDM di sektor pariwisata dengan fokus pada digitalisasi dan peningkatan kapasitas, khususnya di desa wisata. Sinergi antara pusat, daerah, dan lembaga eksternal seperti NGO, kampus, dan influencer

mendukung pengembangan ini. Di sisi infrastruktur, kerja sama antara Kemenparekraf, Kemen PUPR, dan Kemenhub dalam memperkuat akses, sarana transportasi, dan fasilitas penginapan telah membuahkan hasil positif, didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan. Penetapan regulasi yang mendukung pariwisata hijau dan berkelanjutan juga menjadi kekuatan, menciptakan landasan kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran kelembagaan yang melibatkan sektor swasta, NGO, LSM, dan akademisi menambah dukungan terhadap pengembangan pariwisata, terutama dalam pengelolaan desa wisata.

Kedua, pada aspek, **Weaknesses (Kelemahan)**, meskipun terdapat inisiatif untuk meningkatkan SDM, implementasi di tingkat lokal masih kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan di desa wisata. Perbedaan harga tiket pesawat domestik dan internasional yang signifikan menjadi hambatan bagi wisatawan dalam negeri, sementara distribusi infrastruktur yang tidak merata menyebabkan ketimpangan antara destinasi wisata utama dan daerah yang kurang berkembang. Tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan ketidakefisienan, menghambat efektivitas program yang dirancang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa wisata belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan, dengan banyak desa masih kesulitan mengimplementasikan prinsip ekonomi hijau secara efektif. Kolaborasi lintas sektoral yang belum optimal juga mengurangi efektivitas program pariwisata berkelanjutan.

Ketiga, pada aspek, **Opportunities (Peluang)**, transformasi digital di desa wisata memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas di destinasi wisata prioritas dan super-prioritas, ditambah dengan potensi subsidi harga tiket pesawat, dapat menarik lebih banyak wisatawan. Pengembangan pariwisata hijau menawarkan potensi untuk menarik segmen wisatawan yang peduli lingkungan, meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional. Dukungan sektor swasta dan NGO/LSM melalui kemitraan dapat membuka peluang baru dalam pendanaan dan pengembangan desa wisata, sementara kolaborasi lintas sektoral yang

lebih erat bisa mempercepat pengembangan pariwisata dan memperkuat ekosistem investasi di Indonesia.

Keempat, pada aspek, **Threats (Ancaman)**, perkembangan teknologi yang pesat bisa menjadi tantangan bagi desa wisata yang belum siap dari segi infrastruktur dan pengetahuan digital. Ketergantungan pada anggaran pemerintah dan birokrasi yang lambat dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, sementara ketidaksielarasan regulasi antara pusat dan daerah berpotensi menurunkan efektivitas program pengembangan pariwisata. Risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat merusak lingkungan, mengurangi daya tarik destinasi wisata, dan memperburuk dampak perubahan iklim. Jika kolaborasi lintas sektoral tidak berjalan dengan baik, risiko tumpang tindih kebijakan dan inisiatif bisa semakin besar, menghambat upaya pengembangan pariwisata nasional.

Secara keseluruhan, pengelolaan desa wisata dengan pendekatan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perwujudan green economy di Indonesia. Dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, desa wisata dapat menjadi motor penggerak untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, manfaat dari pengelolaan desa wisata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal dan industri pariwisata, tetapi juga oleh lingkungan alam secara keseluruhan.

15. **Strategi Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Guna Mendukung Green economy.**

Kolaborasi dan sinergi sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia karena pengembangan desa wisata merupakan upaya multifaset yang membutuhkan keterlibatan dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat setempat semuanya memiliki peran unik yang saling melengkapi dalam upaya ini. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memberikan kerangka regulasi, infrastruktur dasar, dan kebijakan pendukung yang mendorong pengembangan desa wisata. Sektor swasta, termasuk investor dan operator pariwisata, membawa modal finansial,

keahlian dalam manajemen wisata, serta jaringan pemasaran yang luas yang dapat meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas desa wisata.

Sinergi antara berbagai pihak memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, meminimalkan tumpang tindih, dan memastikan bahwa setiap aspek dari pengembangan desa wisata mendapat perhatian yang cukup. Misalnya, pemerintah dapat fokus pada penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan sanitasi, sementara sektor swasta dapat menangani investasi dalam fasilitas wisata dan pemasaran. Komunitas lokal dapat mengelola atraksi wisata dan kegiatan budaya, sementara LSM dan akademisi dapat berkontribusi melalui pelatihan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini juga memungkinkan adanya aliran informasi dan pengetahuan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, pelaku usaha pariwisata dapat memberikan masukan mengenai preferensi dan kebutuhan wisatawan, yang dapat digunakan oleh komunitas lokal untuk menyesuaikan produk wisata mereka. Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan data dan statistik yang berguna bagi perencanaan strategis oleh sektor swasta.

Dengan bekerja bersama, berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, promosi yang kurang efektif, dan minimnya akses terhadap sumber daya finansial dan pendidikan dapat diatasi secara lebih efisien. Sinergi ini juga dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan desa wisata, seperti pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan, wisata berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan reservasi.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat setempat dalam sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan sanitasi, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata. Sektor swasta, termasuk investor dan operator pariwisata, dapat berkontribusi dengan investasi finansial, keahlian dalam manajemen wisata, dan jaringan pemasaran yang luas untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas desa wisata. Komunitas lokal dan masyarakat setempat, yang memiliki

pengetahuan mendalam tentang budaya dan tradisi lokal, harus dilibatkan secara aktif untuk memastikan pengembangan desa wisata yang autentik dan berkelanjutan. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi dapat berperan dalam memberikan pelatihan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi ini harus mencakup pembagian tanggung jawab yang jelas, aliran informasi yang baik, dan kerjasama dalam perencanaan strategis untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, promosi yang kurang efektif, dan minimnya akses terhadap sumber daya finansial dan pendidikan. Dengan pendekatan yang terpadu dan inklusif ini, desa wisata di Indonesia dapat berkembang menjadi destinasi yang menarik, kompetitif, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal serta ekonomi nasional.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang mencerminkan konsep pemberdayaan sebagaimana dijelaskan oleh Maani (2011)⁶⁴. Pemberdayaan ini menekankan otonomi pengambilan keputusan oleh kelompok masyarakat lokal, berdasarkan sumber daya, partisipasi, demokrasi, dan pengalaman langsung. Dalam konteks ini, pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat setempat harus berkolaborasi dengan cara yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga memberikan kekuatan politik dan daya tawar yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah bisa menyediakan infrastruktur dasar dan regulasi pendukung, sementara sektor swasta dapat berinvestasi dan membawa keahlian dalam manajemen dan pemasaran pariwisata. Komunitas lokal dan masyarakat setempat perlu terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa wisata, memastikan bahwa pengembangan ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta menjaga keaslian dan keberlanjutan budaya dan lingkungan lokal. LSM dan akademisi dapat berkontribusi melalui pelatihan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, mendukung proses belajar dari pengalaman langsung. Dengan demikian, pemberdayaan di sini mencakup aspek ekonomi dan politik, memungkinkan masyarakat lokal untuk memiliki pengaruh yang

⁶⁴ Karjuni Dt. Maani, 2011, "Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Demokrasi*, hlm. 53-66.

lebih besar dalam menentukan arah pembangunan desa wisata mereka, serta berpartisipasi dalam interaksi nasional dan internasional. Sinergi antara pendekatan top-down dari pemerintah dan sektor swasta dengan pendekatan bottom-up dari komunitas lokal menciptakan strategi pertumbuhan yang berpusat pada masyarakat, menjadikan desa wisata lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat berbagai strategi, solusi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia. **Pertama, aspek Sumber Daya Manusia (SDM).** Mengatasi permasalahan terkait aspek sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan desa wisata di Indonesia, terutama dalam hal kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi (TI), dan keterampilan manajerial, memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat meluncurkan program pelatihan terpadu yang berfokus pada peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, literasi TI, dan keterampilan manajerial bagi masyarakat lokal. Pelatihan ini bisa diselenggarakan melalui kerja sama dengan universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta, yang memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan.

Program pelatihan tersebut bisa melibatkan modul interaktif, kursus online, dan workshop langsung yang dirancang untuk memudahkan transfer pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta. Misalnya, kursus bahasa Inggris yang berfokus pada situasi sehari-hari dan kebutuhan pariwisata, pelatihan TI yang mencakup penggunaan media sosial dan platform e-commerce untuk promosi desa wisata, serta pelatihan manajerial yang meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Dengan dukungan dari perusahaan teknologi dan institusi pendidikan, program ini dapat menyediakan akses ke perangkat teknologi dan sumber belajar yang relevan.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan desa wisata, meningkatkan daya saing desa wisata di pasar global, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pentingnya program ini terletak pada upaya pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan otonomi mereka dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di sektor pariwisata⁶⁵.

Ditinjau dari Konsep Pemberdayaan oleh Maani (2011), program ini tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi tetapi juga aspek politik dan sosial, memberikan masyarakat lokal daya tawar yang lebih kuat di tingkat nasional dan internasional⁶⁶. Dengan sinergi antara pendekatan top-down dari pemerintah dan bottom-up dari komunitas lokal, inisiatif ini menciptakan strategi pertumbuhan yang berpusat pada masyarakat, menjadikan pengelolaan desa wisata lebih berkelanjutan dan inklusif.

Kedua, mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di desa wisata memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, dan komunitas lokal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memainkan peran kunci dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur. Mereka dapat mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aksesibilitas ke desa wisata⁶⁷⁶⁸.

Kemendes PDTT dapat memanfaatkan dana desa untuk membangun fasilitas penting seperti pusat informasi wisata, toilet umum yang bersih, dan tempat parkir yang memadai. Selain itu, mereka juga bisa mengadakan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merawat dan mengelola infrastruktur tersebut. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.

⁶⁵ "Desa Wisata Kampung Wisata Edukatif dan Kreatif Mucila," diakses dari https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/_edukatif_dan_kreatif_mucila pada X.

⁶⁶ Karjuni Dt. Maani, 2011, "Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat," loc. cit.

⁶⁷ "2024 Indonesian Tourism Village Award launched," diakses dari <https://en.vietnamplus.vn/2024-indonesian-tourism-village-award-launched-post282909.vnp> pada X.

⁶⁸ Resya Rasyidah & Ahmad Zamzamy, 2023, "Analysis of the Development of Tourism Villages as Community-Based Tourism to Attract Foreign Tourists to Indonesia After the Covid-19 Pandemic," *Nusantara Science and Technology Proceeding*, hlm. 61-68.

Untuk meningkatkan aksesibilitas, kerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting. Misalnya, membangun kemitraan dengan perusahaan transportasi lokal untuk menyediakan layanan transportasi yang terjangkau dan teratur ke desa wisata. Peningkatan jaringan internet di desa wisata juga krusial untuk menarik wisatawan digital dan mempromosikan destinasi tersebut secara lebih luas.

Perawatan infrastruktur dapat dilakukan melalui program gotong royong yang melibatkan masyarakat desa. Ini tidak hanya memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi baik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap fasilitas tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi pelaporan kerusakan infrastruktur dapat membantu pemerintah desa dan pengelola wisata untuk segera menangani masalah yang muncul.

Tujuan dari solusi-solusi ini, selaras dengan teori Pemberdayaan adalah untuk meningkatkan daya tarik desa wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan pada akhirnya mendorong perekonomian lokal. Pentingnya perbaikan sarana dan prasarana tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat dan pelestarian budaya serta lingkungan desa wisata. Melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif, diharapkan desa wisata di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan berkelanjutan.

Ketiga, aspek regulasi. Mengatasi tumpang tindih regulasi dalam pengelolaan desa wisata membutuhkan pendekatan yang melibatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah melalui pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Satuan tugas ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Hukum dan HAM untuk meninjau dan menyelaraskan regulasi yang ada.

Kemenparekraf dapat memfasilitasi pertemuan rutin antara para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tumpang tindih regulasi yang menghambat pengembangan desa wisata. Mereka juga

dapat melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat desa dan pelaku industri pariwisata. Langkah-langkah ini bisa dimulai dengan penyusunan draf peraturan bersama yang mengintegrasikan berbagai aspek regulasi menjadi satu kesatuan yang lebih harmonis dan mudah dipahami oleh semua pihak.

Kemendagri berperan dalam memastikan regulasi yang diterapkan di tingkat lokal selaras dengan kebijakan nasional. Mereka dapat memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah yang mendukung pengelolaan desa wisata tanpa bertentangan dengan peraturan di tingkat pusat. Selain itu, Kemendes PDTT dapat berkontribusi dengan menyediakan panduan teknis mengenai penggunaan dana desa yang sesuai dengan regulasi terbaru untuk pengembangan pariwisata.

Tujuan utama dari upaya ini, selaras dengan *value* teori *Green Economy*, yakni menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan koheren untuk mendukung pengelolaan desa wisata hijau secara efektif. Pentingnya langkah ini terletak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program pembangunan desa wisata, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan regulasi yang lebih sederhana dan terintegrasi, proses perizinan dan implementasi program akan menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan kunjungan wisatawan. Melalui kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga, serta dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, diharapkan pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Keempat, masalah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan desa wisata, pendekatan berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) menonjol sebagai strategi yang efektif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, bersama dengan lembaga-lembaga lokal, memainkan peran kunci dalam penerapan dan pengawasan praktik ini. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pengelolaan dan keputusan terkait pariwisata, memastikan bahwa manfaat dari aktivitas pariwisata didistribusikan secara adil dan berkelanjutan⁶⁹.

⁶⁹ Setiawan Priatmoko, Moaaz Kabil, Yitno Purwoko, & Lóránt Dénes Dávid, 2021, "Rethinking

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas lokal melalui pelatihan dan pendidikan, mempromosikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi serta melestarikan sumber daya alam dan budaya. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan tetapi juga tempat yang memperkuat daya tahan dan kesejahteraan komunitas lokal⁷⁰.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digalakkan untuk meningkatkan visibilitas dan pemasaran desa wisata, memudahkan pengelolaan sumber daya dan memonitor dampak lingkungan secara real-time. Penggunaan TIK ini sejalan dengan konsep "leapfrogging" dan "flight of the flamingos", yang merupakan strategi untuk melompati tahapan tradisional pembangunan pariwisata dengan penerapan solusi inovatif yang mempercepat pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan⁷¹.

Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di daerah pedesaan, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa pariwisata berkembang sebagai alat pemajuan masyarakat dan pelestarian budaya. Dengan demikian, desa wisata bukan hanya menjadi tujuan yang menarik bagi pengunjung tetapi juga menjadi model pembangunan berkelanjutan yang bisa direplikasi di daerah lain.

Kelima, peran dan dukungan kelembagaan. Untuk mengatasi peran dan dukungan kelembagaan yang belum optimal dalam pengelolaan desa wisata, pendekatan yang efektif adalah memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. Kementerian Pariwisata dan Lembaga Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Ini meliputi peningkatan kapasitas institusi desa melalui pelatihan, pemberian sumber daya, dan pembuatan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Tujuannya, berdasarkan teori *Green Economy*, adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengelolaan desa wisata yang

Sustainable Community-Based Tourism: A Villager's Point of View and Case Study in Pampang Village, Indonesia," *Sustainability*, hlm. 1-15.

⁷⁰ Nafiah Ariyani & Akhmad Fauzi, 2023, "Pathways toward the Transformation of Sustainable Rural Tourism Management in Central Java, Indonesia," *Sustainability*, hlm. 1-19.

⁷¹ *Ibid.*

efektif, yang tidak hanya memajukan kepentingan ekonomi lokal tetapi juga memelihara dan melestarikan lingkungan. Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya

Keenam, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat dalam pengelolaan desa wisata, peran aktif dari masyarakat lokal dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait kegiatan pariwisata sangat penting. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama dengan pemerintah daerah, dapat memainkan peran kunci dalam mendorong penerapan prinsip Community-Based Tourism (CBT). Inisiatif ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembagian manfaat dari kegiatan pariwisata, yang tidak hanya memperkuat kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga membantu dalam pelestarian budaya dan sumber daya alam lokal⁷².

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan teknologi informasi dalam promosi dan pengelolaan destinasi wisata desa untuk meningkatkan keterlibatan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Program pelatihan dan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam entrepreneurship dan manajemen pariwisata juga sangat penting untuk memastikan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari industri ini⁷³.

Tujuan dari semua upaya ini adalah untuk menciptakan model pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, yang menguntungkan baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, berdasarkan prinsip-prinsip teori Pemberdayaan. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat tetapi juga penting dalam konteks pelestarian lingkungan dan

⁷² Andini Risfandini, Irwan Yulianto, Wan-Hafiz Wan-Zainal-Shukri, "Local Community Empowerment for Sustainable Tourism Development: A Case Study of Edelweiss Park Wonokitri Village," *IETA*.

⁷³ Shahrukh Khalid, Muhammad Shakil Ahmad, T. Ramayah, Jinsoo Hwang, and Insin Kim, 2019, "Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Community Support for Tourism," *Sustainability*, hlm. 1-14.

keberlanjutan sosial jangka panjang.

Ketujuh, kolaborasi lintas sektoral. Mengatasi kurangnya kolaborasi lintas sektoral dalam pengelolaan desa wisata, terutama dalam hal adopsi teknologi, link and match, dan transfer pengetahuan, memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan mendukung dari berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi inisiatif kolaborasi ini. Pendekatan yang bisa diterapkan meliputi pengembangan platform digital untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas desa wisata, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar berbagai pemangku kepentingan melalui workshop, seminar, dan pelatihan yang terfokus pada pengembangan kapasitas dan inovasi digital⁷⁴.

Sesuai dengan teori Manajemen, tujuan utama dari usaha ini adalah untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempromosikan adopsi teknologi di sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat kerjasama antar sektor untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang lebih luas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa desa wisata tidak hanya dapat bertahan dalam menghadapi perubahan pasar, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dan pelestarian budaya serta lingkungan.

Tidak hanya sampai di situ, mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan desa wisata memerlukan pendekatan terintegrasi yang menyesuaikan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, yang sering disebut sebagai analisis PESTEL.

Dari sisi politik, pemerintah pusat dan daerah harus lebih aktif dalam membangun sinergi yang lebih kuat dan efektif. Peningkatan regulasi yang mendukung investasi berkelanjutan dan promosi desa wisata yang efektif adalah kunci untuk menarik lebih banyak dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye advokasi yang lebih

⁷⁴ "Digital innovation: Cross-sectoral dynamics and policy implications," diakses dari <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ee2a2c2f-en/index.html?itemId=/content/component/ee2a2c2f-en>, pada X.

luas dan integrasi kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

Secara ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan merupakan langkah penting. Hal ini termasuk menciptakan pasar yang lebih luas untuk produk lokal dan memperkenalkan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal. Kemitraan strategis dengan sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk membawa investasi dan inovasi yang dapat membantu mengembangkan infrastruktur dan layanan yang lebih baik.

Aspek sosial juga sangat penting dalam pengelolaan desa wisata. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya pariwisata dan pelestarian sumber daya merupakan langkah dasar. Integrasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen desa wisata akan memperkuat kepemilikan lokal dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil.

Dalam hal teknologi, adopsi solusi digital dan teknologi ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menarik wisatawan yang lebih sadar lingkungan. Penggunaan platform digital untuk promosi dan pengelolaan desa wisata dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman pengunjung, sementara energi terbarukan dan teknologi hijau dapat mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata.

Mengenai lingkungan, desa wisata harus menerapkan praktik yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Program konservasi, pendidikan lingkungan bagi pengunjung dan masyarakat lokal, serta implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan adalah vital untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian sumber daya alam.

Akhirnya, dari sisi legal, penegakan regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan bahwa semua aktivitas pariwisata berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Regulasi yang melindungi area sensitif dan kearifan lokal harus diprioritaskan untuk menghindari eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif, mengatasi

masalah-masalah dalam pengelolaan desa wisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, pengunjung, serta lingkungan, dan membantu desa wisata tersebut berkembang menjadi destinasi yang berkelanjutan dan menarik.

Lebih lanjut, mengintegrasikan teori manajemen Max Weber dalam mengatasi masalah pengelolaan desa wisata dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di bawah model Weber, perencanaan yang baik membutuhkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memimpin dalam menyusun strategi yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, potensi ekonomi, dan pelestarian budaya. Melalui perencanaan yang matang, kebijakan dan program yang dirancang dapat mendukung visi jangka panjang pengembangan desa wisata secara holistik⁷⁵.

Dalam tahap pengorganisasian, penting bagi Kementerian Pariwisata untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk membentuk tim yang akan mengelola operasional desa wisata. Struktur ini harus membagi tugas dan menentukan tanggung jawab dengan jelas untuk setiap tim atau unit, dari pemasaran hingga pengelolaan sumber daya alam, sehingga memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, dalam fase implementasi, koordinasi yang efektif antara berbagai entitas yang terlibat sangat vital. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan proyek-proyek pengembangan harus dijalankan dengan disiplin dan pengelolaan yang ketat, memastikan bahwa setiap elemen dari rencana yang telah disusun dapat berhasil secara optimal.

Akhirnya, tahap pengawasan menjadi kunci untuk mengukur kesuksesan dan melakukan penyesuaian bila perlu. Kementerian harus memastikan ada mekanisme evaluasi yang efektif untuk memonitor semua aspek operasional desa wisata. Ini meliputi keuangan, operasional, sosial, dan lingkungan. Sistem pengawasan harus dirancang untuk tidak hanya mengidentifikasi deviasi atau kekurangan tetapi juga untuk merayakan keberhasilan dan

⁷⁵ Yusri A. Boko, 2022, "Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah dan Teori Organisasi Klasik)," *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)* hlm. 49-61.

menemukan peluang untuk peningkatan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip manajemen klasik ini, pengelolaan desa wisata tidak hanya akan lebih terstruktur dan efisien tetapi juga lebih mampu beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi tantangan, sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap pelestarian budaya dan lingkungan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Indonesia, koordinasi dan kolaborasi antar-kementerian dan lembaga terkait memainkan peran vital. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia dan *Indonesian Tourism Village Award*, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan tetapi juga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata. Upaya ini mendukung desa-desa dalam mempromosikan dan mengembangkan atraksi wisata unik yang berakar pada budaya dan kearifan lokal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas dan keberlanjutan operasional desa wisata, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) memastikan bahwa praktik-praktik berkelanjutan diterapkan untuk melindungi lingkungan alami yang sering menjadi daya tarik utama desa wisata.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan fiskal yang memungkinkan untuk investasi dalam infrastruktur dan insentif untuk pelaku usaha di desa wisata, sedangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja untuk memperbaiki konektivitas yang memudahkan akses ke desa-desa wisata, yang sangat penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendukung pengembangan ekonomi kreatif di desa wisata dengan membantu UMKM lokal mengembangkan dan memasarkan produk mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertanggung jawab untuk meninjau

dan mengesahkan peraturan yang mendukung pengembangan desa wisata, memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mendukung pertumbuhan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan desa-desa wisata di Indonesia dapat berkembang menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan baik lokal maupun internasional, sekaligus memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Tidak hanya sampai di situ, dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan desa wisata, peran kalangan akademisi, pakar, perguruan tinggi, sektor swasta, perusahaan, korporasi, serta media massa sangat penting dan saling terintegrasi untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Kalangan akademisi dan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam riset dan pengembangan. Mereka menyediakan data dan analisis yang mendalam mengenai tren pariwisata, keberlanjutan lingkungan, dan dinamika sosial ekonomi desa. Penelitian yang dilakukan bisa membantu desa-desa wisata menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, perguruan tinggi sering kali menjadi konsultan dalam merumuskan dan menerapkan program pengembangan kapasitas masyarakat lokal, sehingga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung industri pariwisata.

Sektor swasta, termasuk perusahaan dan korporasi, berperan dalam investasi dan pengelolaan operasional yang efektif. Mereka tidak hanya membawa modal yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan layanan pariwisata, tetapi juga pengalaman dan jaringan pemasaran yang luas yang dapat meningkatkan visibilitas desa wisata. Kerjasama antara desa wisata dengan hotel, restoran, dan bisnis travel dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat daya tarik desa wisata sebagai destinasi yang menarik.

Media massa memiliki peran penting dalam promosi dan pengenalan desa wisata kepada publik luas. Melalui pemberitaan yang efektif, media dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengunjungi desa-desa wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kunjungan dan pendapatan lokal. Media juga berperan dalam membangun citra positif dan menceritakan kisah-kisah sukses dari desa wisata yang telah berhasil

mengimplementasikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi antara semua pihak ini tidak hanya memperkuat pengelolaan desa wisata, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, yang menguntungkan baik bagi pengunjung maupun masyarakat lokal.

Berangkat dari paparan di atas, mengoptimalkan pengelolaan pariwisata guna mendukung ekonomi hijau berperan penting dalam mewujudkan green economy yang melibatkan berbagai aspek mulai dari perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, hingga kesejahteraan yang merata. Perlindungan lingkungan dalam konteks pariwisata berkelanjutan melibatkan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Ini termasuk mengurangi emisi, mengelola limbah dengan efektif, dan menjaga kelestarian flora dan fauna lokal. Standar dan sertifikasi hijau untuk akomodasi dan transportasi, seperti yang diimplementasikan di Perancis dan Austria, membantu menetapkan praktik terbaik yang harus diikuti oleh industri pariwisata guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif memastikan bahwa penduduk lokal terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di area mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan di kalangan komunitas lokal, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Misalnya, melalui pelatihan dan sumber daya yang memadai, masyarakat dapat mengembangkan produk atau layanan yang berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya lokal tanpa merusaknya.

Kesejahteraan yang merata melalui pariwisata hijau mencakup distribusi keuntungan yang adil dari pariwisata ke seluruh masyarakat. Ini melibatkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata tidak hanya terbatas pada pemilik bisnis besar, tetapi juga merambah ke sektor yang lebih luas termasuk pekerja dan komunitas kecil. Integrasi rantai pasok lokal dalam operasi pariwisata membantu menjaga uang tetap dalam ekonomi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

a. Optimalisasi pengelolaan pariwisata sangat penting untuk mendukung *green economy* di Indonesia, karena potensi pariwisata yang besar belum maksimal berkontribusi terhadap PDB nasional. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah, jumlah desa wisata masih relatif kecil, sehingga perlu peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Optimalisasi ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, tetapi juga mendorong Indonesia keluar dari *middle income trap*. Pengelolaan pariwisata yang baik, terutama di desa wisata, harus melibatkan branding yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat, daerah, swasta, dan NGO. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis ekonomi hijau yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan harus menjadi prioritas untuk mencapai pariwisata berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara simultan.

Kondisi pengelolaan pariwisata di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung ekonomi hijau, terbukti dengan meningkatnya jumlah desa wisata. Pemerintah telah menyusun RIDPN dan menerapkan kebijakan seperti “*Roadmap Blue, Green, and Circular Economy (BGCE)*” serta memperkuat infrastruktur, regulasi, dan anggaran untuk pariwisata berkelanjutan. Tantangan utama masih berupa keterbatasan anggaran desa wisata dan perlunya integrasi konsep wisata yang komprehensif. Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk swasta, NGO,

akademisi, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan desa wisata yang berorientasi ekonomi hijau dan mendukung SDGs.

b. Namun, pengelolaan desa wisata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangan *green economy*, seperti: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang kurang efektif, dan masalah lingkungan. Sementara itu, dukungan pemerintah, tren pariwisata berkelanjutan, dan kemajuan teknologi membuka peluang besar bagi pengembangan desa wisata yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, ancaman seperti *over tourism*, komersialisasi budaya, dan dampak perusakan lingkungan memerlukan upaya tersebut. Untuk mengoptimalkan potensi desa wisata, analisis SWOT menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

c. Oleh karena itu, pengelolaan desa wisata di Indonesia untuk mendukung *green economy* memerlukan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat setempat. Pemerintah dapat menyediakan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan pendukung, sementara sektor swasta membawa investasi dan keahlian dalam manajemen wisata. Komunitas lokal berperan dalam mengelola atraksi wisata dan kegiatan budaya, dengan dukungan dari LSM dan akademisi dalam hal pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi ini memungkinkan pembagian tanggung jawab yang jelas, aliran informasi yang efektif, dan kolaborasi dalam perencanaan strategis untuk mengatasi tantangan infrastruktur, promosi, dan akses sumber daya. Dengan demikian, desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan, menarik, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal serta ekonomi nasional.

17. Rekomendasi

a. **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** perlu menginisiasi program *Green Tourism Startup Incubator* yang memberikan dukungan berupa pendanaan, bimbingan, dan akses ke jaringan industri bagi startup yang memiliki solusi inovatif dalam bidang pariwisata

berkelanjutan. Program ini dapat menarik ide-ide kreatif dari generasi muda yang berpotensi mengubah industri pariwisata menjadi lebih ramah lingkungan. Selain itu, kementerian ini dapat bekerja sama dengan platform teknologi untuk mengembangkan aplikasi *mobile* yang menyediakan informasi real-time tentang destinasi wisata hijau, *eco-friendly accommodations*, serta kegiatan ramah lingkungan yang dapat dilakukan wisatawan.

- b. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** dapat meluncurkan proyek *Eco-Certification for Tourism* yang memberikan sertifikasi hijau kepada destinasi wisata, hotel, dan restoran yang memenuhi standar tertentu dalam hal keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Sertifikasi ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang peduli lingkungan, serta mendorong pelaku industri pariwisata untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Kementerian juga bisa mengembangkan program *Adopt a Green Space*, di mana wisatawan dan perusahaan dapat menyumbangkan dana untuk pemeliharaan dan konservasi taman nasional dan area hijau lainnya.
- c. **Kementerian Perhubungan** dapat mengembangkan sistem *Eco-Transport Hub* di kota-kota wisata utama yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik, sepeda, dan kendaraan berbasis tenaga surya. Hub ini dapat dilengkapi dengan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik dan fasilitas parkir untuk sepeda. Selain itu, kementerian ini dapat meluncurkan program *Green Travel Pass* yang memberikan akses diskon atau gratis untuk transportasi umum ramah lingkungan bagi wisatawan yang menggunakan transportasi hijau selama liburan mereka.
- d. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** perlu menginisiasi program *Green Energy Tourism Zones* yang mendorong pengembangan kawasan wisata dengan infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan biomassa. Kawasan ini dapat menjadi contoh praktik terbaik dalam penggunaan energi terbarukan di sektor pariwisata dan menarik wisatawan yang tertarik pada teknologi hijau. Kementerian

juga bisa memberikan insentif pajak bagi hotel dan resort yang beralih ke penggunaan energi terbarukan.

- e. **Pemerintah Daerah** melalui Dinas terkait seperti: Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Desa perlu lebih intensif berinovasi dan mempromosikan destinasi wisata lokal yang berkelanjutan, khususnya dalam mengelola area wisata dengan prinsip *green economy*. Mereka juga bisa mengembangkan program pariwisata komunitas yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi. Dinas Lingkungan Hidup Daerah bertanggung jawab memantau dan memastikan bahwa praktik-praktik pariwisata di daerah tidak merusak lingkungan, serta mengadakan kampanye kesadaran lingkungan untuk wisatawan dan masyarakat lokal.
- f. **Sektor swasta** perlu berkontribusi melalui pembangunan dan pengelolaan hotel dan resort yang mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pengurangan penggunaan plastik. Mereka juga bisa mengembangkan program ekowisata yang menarik wisatawan dengan minat khusus pada keberlanjutan. Operator tur dapat menyusun paket tur yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan melatih pemandu wisata untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya konservasi lingkungan.
- g. **Akademisi dan peneliti dari universitas dan lembaga riset** perlu lebih optimal dalam menjalankan penelitian mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan dan mengembangkan solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Mereka juga dapat menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk membuat keputusan yang lebih baik.
- h. **Media massa** perlu mengoptimalkan fungsi informasi dan edukasi dalam menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan *green economy*. Mereka bisa mempromosikan destinasi wisata hijau dan praktik terbaik dalam pariwisata berkelanjutan.
- i. **Masyarakat lokal**, melalui komunitas dan kelompok kerja, perlu mengadakan program edukasi dan pelatihan tentang praktik-praktik

pariwisata berkelanjutan. Mereka juga bisa terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Selain itu, masyarakat lokal dapat mengadakan festival atau acara budaya yang mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan menampilkan produk lokal yang ramah lingkungan.

- j. **LSM lingkungan** perlu memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk proyek-proyek pariwisata berkelanjutan, serta mengadakan *workshop* dan pelatihan untuk pelaku industri pariwisata mengenai praktik terbaik dalam pariwisata berkelanjutan. Organisasi internasional dapat meluncurkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan mengajak wisatawan untuk berperilaku ramah lingkungan. Mereka juga bisa membangun jaringan global yang menghubungkan destinasi wisata dengan praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.



Daftar Pustaka

Buku

M. Firmansyah, 2022, "Konsep Turunan *Green economy* dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur," *Ecoplan*, hlm.141-149.
Modul Ajar Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional.

Jurnal

- A. Faidlal Rahman, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata," *Media Wisata* 6, no. 1 (12 Juni 2021), DOI.
- Agung Yoga Asmoro, "Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Terhadap Metode, Topik, Dan Aplikasinya," *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 8 Januari 2023, URL.
- Ahmadintya Anggit Hanggraito, Eka Afrida Ermawati, and Esa Riandy Cardias, "Pengembangan Blueprint Wisata Desa Dan Paket Wisata Sebagai Upaya Akselerasi Desa Tambong Sebagai Desa Wisata," *Pamasa : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (27 Juni 2023): 1, DOI.
- Andini Risfandini, Irwan Yulianto, Wan-Hafiz Wan-Zainal-Shukri, "Local Community Empowerment for Sustainable Tourism Development: A Case Study of Edelweiss Park Wonokitri Village," *IETA*.
- Andre Ariesmansyah, dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58-72.
- Basuki Antariksa, dkk. (2023). *Policy Paper: Pemetaan Kapasitas SDM Pariwisata Hijau Bagi Desa Wisata Menuju Ekonomi Sirkular*. Direktorat Kajian

- Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. hlm 10.
- Haiyyu Darman Moenir, “Implementasi Pariwisata dalam Kebijakan Pariwisata di Masa Pemerintahan Jokowi,” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 6, no. 1 (1 Mei 2017): 57, DOI
- Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia, “Pengelolaan Desa Wisata Dengan Konsep Green Economy Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Wisata di Provinsi Lampung Dan Jawa Barat),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 2 (14 November 2021): 546, DOI.
- Herindiyah Kartika Yuni et al., “Pemberdayaan UMKM Berbasis Potensi Alam Dalam Menunjang Pengembangan Desa Wisata Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan,” *BHAKTI PERSADA* 9, no. 1 (20 Maret 2023): 16–25, DOI.
- I Made Pujiwiyasnawa & I Gusti Agung Oka Mahagangga, 2018, “Problematika Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,” *Jurnal Destinasi Pariwisata*, hlm. 368-370.
- Ismail Suardi Wekke, “Rintisan Desa Wisata, Prospek Pengembangan Dan Kajian Awal,” *Pengabdian Masyarakat Desa Wisata*, 16 Juli 2022, DOI.
- Kemenparekraf RI. (2024, February 5). *Mewujudkan Parekraf Hijau 2024, Bagaimana Implementasinya?* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/mewujudkan-parekraf-hijau-2024-bagaimana-implementasinya>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Visi Indonesia 2045* [Disampaikan dalam orasi ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia]. Kementerian PPN/Bappenas. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPaparanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf>
- Melynia Ariningtyas Prabawati, 2022, “Konsep *Green Economy* pada Pola Produksi dan Konsumsi Sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Berkualitas Berbasis Ekologi,” *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, hlm. 36-42.
- Mohamad Agus Sanjayah, Agus Purnomo, Bayu Kurniawan, “Evaluasi Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kecamatan Pujon

- Kabupaten Malang,” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, hlm. 63-72.
- Muhammad Aulia Taufiqi, Malik Sofy, dan Deden Purbaya, “Analisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Dan Ancaman Dalam Pengembangan Desa Wisata,” *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 7, no. 1 (6 Desember 2023): 1–10, DOI.
- Muhkamat Anwar, 2022, “Green E agai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral,” *PKN*, hlm. 343-356.
- Nafiah Ariyani & Akhmad Fauzi, 2023, “Pathways toward the Transformation of Sustainable Rural Tourism Management in Central Java, Indonesia,” *Sustainability*, hlm. 1-19.
- Novia Purbasari dan Asnawi Manaf, “Karakteristik Elemen Sistem Pariwisata Ekowisata Desa Wisata Nglanggeran Dan Wisata Desa Pada Desa Wisata Pentingsari,” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 13, no. 1 (10 Maret 2017): 100, DOI.
- Nugroho SBM, 2020, “BEBERAPA MASALAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA,” *Pariwisata*, hlm. 124-131.
- Radyahadi dan Nurfara. (2024). “Implementation of Regenerative Tourism in the Development of Tourism Destinations in Indonesia”. *International Journal of Sustainable Competitiveness in Tourism*, 3(1), 1-10.
- Ratna Diyah Palupi dan Ira Risfandi, “Strategi Pengembangan Wisata Bahari Desa Namu Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Sadar Wisata,” *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 14, no. 1 (9 September 2019): 8–14, DOI.
- Resya Rasyidah & Ahmad Zamzamy, 2023, “Analysis of the Development of Tourism Villages as Community-Based Tourism to Attract Foreign Tourists to Indonesia After the Covid-19 Pandemic,” *Nusantara Science and Technology Proceeding*, hlm. 61-68.
- Rizal Fatli Maulana, Muhammad Rosul Asmawi, Pri Utami, “Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang,” *Jurnal Kewarganegaraan*, hlm. 6297-6301.
- Setiawan Priatmoko, Moaaz Kabil, Yitno Purwoko, & Lóránt Dénes Dávid, 2021, “Rethinking Sustainable Community-Based Tourism: A Villager’s Point of

View and Case Study in Pampang Village, Indonesia,” *Sustainability*, hlm. 1-15.

Shahrakh Khalid, Muhammad Shakil Ahmad, T. Ramayah, Jinsoo Hwang, and Insin Kim, 2019, “Community Support and Sustainable Tourism Development: The Mediating Community Support for Tourism,” *Sustainability*, hlm. 1-14.

Tunjung Wulan dan Parfi Khadiyanto, “Identifikasi Potensi dan Masalah Desa Wonosoco dalam Upaya Pengembangan sebagai Desa Wisata di Kabupaten Kudus,” *Jurnal Ruang*, hlm. 81-90.

Winda Fuji Anggina, “Analisis Stabilitas Pariwisata Pedesaan Sebagai Kondisi Yang Sesuai Dengan Pariwisata Berkelanjutan,” *Warta Pariwisata* 20, no. 2 (30 Desember 2022): 1–4, DOI.

Yusri A. Boko, 2022, “Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah dan Teori Organisasi Klasik),” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)* hlm. 49-61.

Yuviani Kusumawardhani, “Kajian 14 Pillar Pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) Sebagai Indikator Daya Saing Pariwisata Suatu Negara,” *Tourism Scientific Journal* 6, no. 1 (23 Desember 2020): 79–95, URL.

Peraturan dan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Artikel Web

“2024 Indonesian Tourism Village Award launched,” diakses dari <https://en.vietnamplus.vn/2024-indonesian-tourism-village-award-launched-post282909.vnp> pada X.

“3 Masalah SDM Pariwisata Indonesia Bersaing di Tingkat Global,” diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-3176358/3-masalah-sdm-pariwisata-indonesia-bersaing-di-tingkat-global> pada 15 Februari 2024 pukul 15.30.

“Apa itu Desa Wisata dan Bagaimana Konsep Pengembangannya?,” diakses dari <https://wonosari.kendalkab.go.id/kabardetail/ZHJxaHA5MkxNUWhxRjNDY2>

krcDZXQT09/apa-itu-ta-dan-bagaimana-konsep-pengembangannya.html pada 15 Februari 2024 pukul 15.45.

“Ayo Jelajahi Desa Wisata Peraih Rekor MURI,” diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7504/ayo-jelajahi-desa-wisata-peraih-rekor-muri?lang=1#:~:text=Kementerian%20Pariwisata%20dan%20Ekonomi%20Kreatif,4%2C674%20desa%20wisata%20di%20Indonesia.> Pada 15 Februari 2024 pukul 15.48.

“Desa Wisata Kampung Wisata Edukatif dan Kreatif Mucila,” diakses dari https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/_edukatif_dan_kreatif_mucila pada X.

“Digital innovation: Cross-sectoral dynamics and policy implications,” diakses dari <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ee2a2c2f-en/index.html?itemId=/content/component/ee2a2c2f-en>, pada X.

“*Green economy*, Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” diakses dari <https://itn.ac.id/opini/15-agustus-23-green-economy-manajemen-pemanfaatan-sumber-daya-alam-sebagai-instrumen-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia/> pada 15 Februari 2024 pukul 15.00.

“pa.ri.wi.sa.ta,” diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pariwisata> pada 15 Februari 2024 pukul 15.10.

Abdul Hamied Razak, “Kritik Gus Hilmy Untuk Pariwisata DIY,” *Harianjogja.com*, 15 September 2020, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2024, pukul 07.49 WIB.

Anggara Wikan Prasetya, “Daftar Pemenang ADWI 2023, Ada 75 Desa Di Seluruh Indonesia,” *KOMPAS.com*, 28 Agustus 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2023, pukul 19.46 WIB

C.S. Purwowidhu. (2023, May 16). *Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi*. Media Keuangan. Retrieved May 21, 2024, from <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>

- Danur Lambang Pristiandaru, "Potensi Besar, Indonesia Bisa Raup Pertumbuhan Hijau Hampir 400 Miliar Dollar As," KOMPAS.com, 13 Juli 2023, diakses dari sumber (Online), pada 29 April 2024, pukul 09.55 WIB.
- Farhan Arda Nugraha. (2023). *Menparekraf: Pariwisata hijau buka lebih banyak peluang kerja*. Antara Retrieved May 21, 2024, from <https://www.antarane.ws.cc/berita/7683/menparekraf-pariwisata-hijau-buka-lebih-banyak-peluang-kerja>
- Febriana Sulistya Pratiwi and Dimas Bayu, "Sebaran Desa Wisata Indonesia Pada 2023, Terbanyak Di Sulsel," DataIndonesia.id, 27 April 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2024, pukul 19.24 WIB
- I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (2022). *Siaran Pers : Kemenparekraf Dorong Peningkatan Kualitas Desa Wisata di Tegal Jateng*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-dorong-peningkatan-kualitas-desa-wisata-di-tegal-jateng>
- I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf Tingkatkan Kesiapan Aksesibilitas di Destinasi Wisata untuk Jaring Wisatawan*. Kemenparekraf RI. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-tingkatkan-kesiapan-aksesibilitas-di-destinasi-wisata-untuk-jaring-wisatawan>
- I Gusti Ayu Dewi Hendriyani. (2023). *Siaran Pers: Menparekraf: Kampanye Sadar Wisata 5.0 Tingkatkan Ketangguhan Desa Wisata Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*. Kemenparekraf RI. Retrieved May 21, 2024, from <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-kampanye-sadar-wisata-50-tingkatkan-ketangguhan-desa-wisata-sebagai-penggerak-ekonomi-masyarakat>
- I Made Mendra Astawa,. (2023). *Minim Dana, Promosi Desa Wisata Belum Optimal*. NusaBali.com. Retrieved May 21, 2024, from <https://www.nusabali.com/berita/151080/minim-dana-promosi-desa-wisata-belum-optimal>
- Kiki Oktaliani, "Indeks Daya Saing Naik 12 Peringkat, Sandiaga Uno Targetkan Pariwisata Indonesia Masuk 30 Besar Dunia Di 2025," SINDOnews Lifestyle,

24 Oktober 2023, diakses dari sumber (Online), pada 25 Maret 2024, pukul 19.16 WIB.

Mediana, "Bangun Desa Wisata, Lingkungan Jangan Diabaikan," kompas.id, 9 September 2022, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2024, pukul 07.32 WIB.

Purwanto. (2021). *Konsep Desa Wisata Belum Optimal*. Radar Bojonegoro. Retrieved May 21, 2024, from <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711315219/konsep-desa-wisata-belum-optimal>

Redaksi, "Desa Wisata Sebagai Idola Baru," kompas.id, 12 September 2022, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2024, pukul 07.53 WIB.

Rusydan Fathy, "Jebakan Eksploitasi Ruang Di Desa Wisata," Tempo, 13 Oktober 2023, diakses dari sumber (Online), pada 22 Mei 2023, pukul 07.59 WIB.

Sekretariat Kabinet RI. (2023, June 14). *Dorong Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Presiden Minta Borobudur Dikelola Entitas Tunggal*. Sekretariat Kabinet. Retrieved May 21, 2024, from <https://setkab.go.id/dorong-destinasi-pariwisata-berkelanjutan-presiden-minta-borobudur-dikelola-entitas-tunggal/>

Sinta Ambarwati. (2023, September 12). *DPR RI setuju anggaran definitif Kemenparekraf 2024 Rp3,53 triliun*. Antaranews.com. Retrieved May 21, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/3724191/dpr-ri-setujui-anggaran-definitif-kemenparekraf-2024-rp353-triliun>

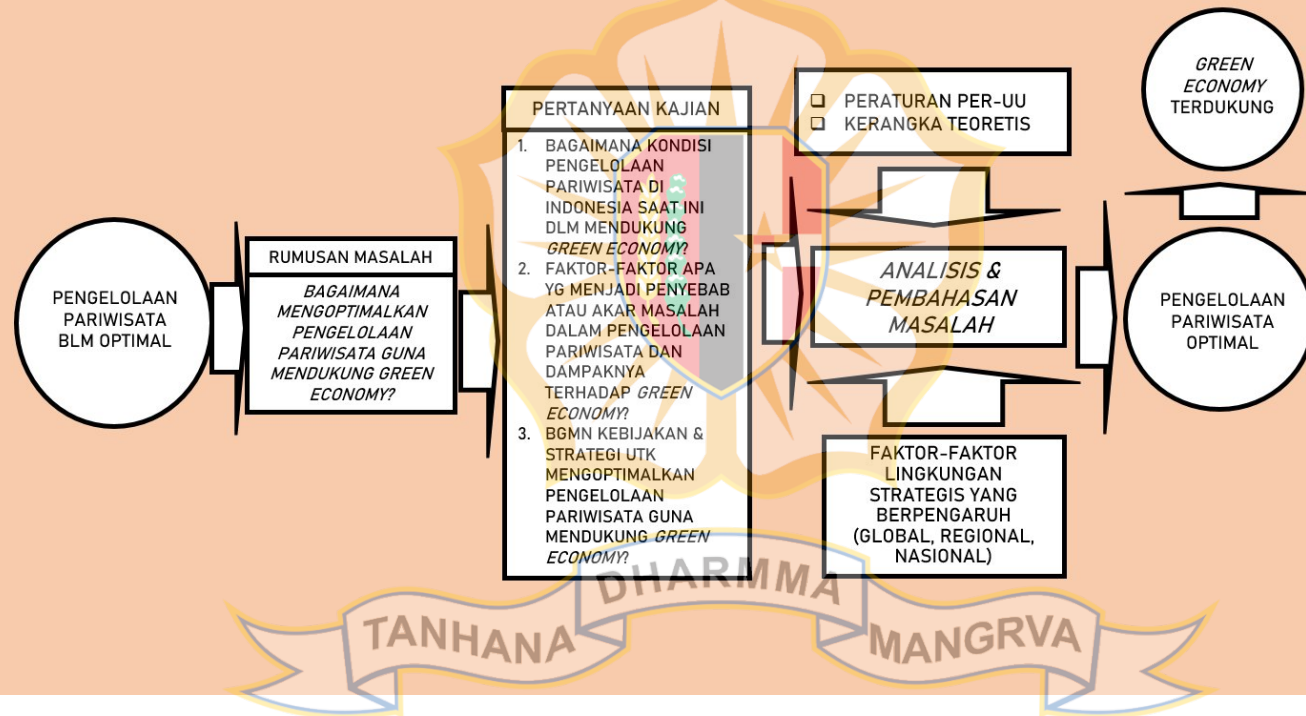






ALUR PIKIR

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PARIWISATA GUNA MENDUKUNG *GREEN ECONOMY*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : SUSWANTO, S.I.K., M.Si.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 71040404
Jabatan/TMT : ANJAK MADYA BIDANG EKONOMI BAINTEKAM POLRI (01-06-2021)
Lama Jabatan : 6 Bulan
Tempat, Tanggal Lahir : KABUPATEN PEMALANG, 22-04-1971
Agama : ISLAM
Suku : JAWA
Status Personel : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
SESPIMMEN	2011
PTIK	2004
AKABRI	1993

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S2	UNIVERSITAS INDONESIA	1997
SMA	SMA NEGERI 1 PEMALANG KABUPATEN PEMALANG PROV. JAWA TENGAH	1990
SMP	NEGERI 1 PEMALANG KAB PEMALANG	1987
SD	SD NEGERI PELUTAN IV KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG	1984

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-07-2019
AKBP	01-07-2009
KOMPOL	01-07-2004
AKP	01-10-1999
IPTU	01-10-1996
IPDA	24-07-1993

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
ANJAK MADYA BIDANG EKONOMI BAINTEKAM POLRI	23-01-2024
AGEN INTELIJEN KEPOLISIAN MADYA TK. III BAINTEKAM POLRI (IIB3)	01-06-2021
DIRINTEKAM POLDA SULTRA (IIB3)	01-05-2020
AKREDITOR UTAMA DIVPROPAM POLRI (IIB3)	05-12-2019
KABIDPROPAM POLDA DIY	18-12-2018
WADIRINTEKAM POLDA DIY (IIIA1)	13-05-2015
KAPOLRES BANGLI POLDA BALI (IIIA2) IIIA2 POLRI	30-05-2013
KAPUSDALOPS RO OPS POLDA BANTEN (IIIB) POLRI	30-03-2010
WADIR INTELKAM POLDA MALUKU UTARA (IVB) POLRI	01-12-2004
KASI PROPAM POLDA MALUKU UTARA POLRI	16-07-2004
PAURMINOPS PUSKODALOPS POLDA SUMBAGSEL POLRI	04-12-2001
KAPUSDALOPS POLRES BANGKA POLDA SUMSEL POLRI	04-10-2001
KAPOLSEKTA ILIR BARAT II POLTABES PALEMBANG P SUMSEL POLRI	21-03-2001
KASAT INTELKAM POLRES BANGKA POLDA SUMBAGSEL POLRI	21-06-1999
KASAT INTELKAM POLRES MUSI RAWAS POLDA SUMBAGSEL POLRI	08-09-1997
KAPOLSEK JAYALOKA POLRES MUSIRAWAS POLDA SUMBAGSEL POLRI	29-08-1995
PAMAPTA POLRES LAHAT POLDA SUMBAGSEL POLRI	30-09-1994
PAMA POLDA SUMBAGSEL POLRI	05-07-1994

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
DIKJUR DAS PA INTEL	1996
DIKJUR PERWIRA PATWAL	1994

VI. Tanda Kehormatan

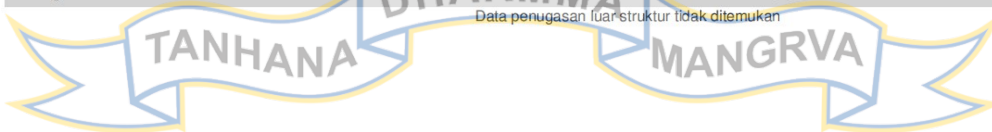
Tanda Kehormatan	TMT
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2019
BINTANG BHAYANGKARA NARARIYA	2018
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2011
SATYALANCANA DHARMA NUSA	2004
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2003
SATYALANCANA DWIDYA SISTHA	2002

VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	AKTIF
JAWA	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan	



Jakarta, 22 - 01 - 2024

**ANJAK MADYA BIDANG EKONOMI
BAINTEKAM POLRI**

SUSWANTO, S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP
71040404